

**ANALISIS UPAYA *JUSTICA GLOBAL* DALAM KASUS PELANGGARAN
HAM DI RIO DE JANEIRO TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADHITYA SURYA RAMADHAN

15323031

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

ANALISIS UPAYA *JUSTICA GLOBAL* DALAM KASUS PELANGGARAN

HAM DI RIO DE JANEIRO TAHUN 2015-2018

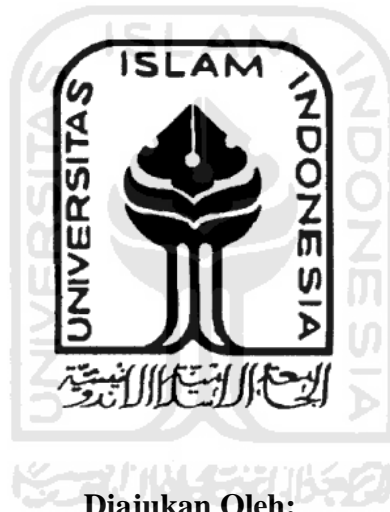
SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Diajukan Oleh:

ADHITYA SURYA RAMADHAN

15323031

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Signifikansi Penelitian	5
1.5. Cakupan Penelitian.....	6
1.6. Tinjauan Pustaka.....	7
1.7. Landasan Konseptual.....	10
1.8. Metode Penelitian	17
1.8.1 Metode Studi Pustaka	19
1.8.2 Metode Dokumentasi	19
1.8.3 Metode Analisis Data	20
BAB II	22
PELANGGARAN HAM PEMERINTAH BRAZIL DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DI RIO DE JANEIRO	22
2.1. Pemerintah Brazil dalam Menyikapi Kemiskinan di Rio de Janeiro.....	22
2.2. <i>Pacifications Police Units</i> (UPP) dalam Mengatasi Kemiskinan di Rio de Janeiro	28
2.2.1. Kekerasan yang Dilakukan <i>Pacifications Police Units</i> (UPP).....	30
2.2.2. Kekerasan Bersenjata di Rio de Janeiro	33
2.3. <i>Justica Global</i> Organisasi Hak Asasi Manusia dan Penguatan Masyarakat Sipil di Rio de Janeiro	35
BAB III.....	43

Upaya <i>Justica Global</i> Menggunakan Konsep <i>Transnational Advocacy Networks</i>	43
3.1. Analisis <i>Justica Global</i> melalui Konsep Politik Informasi	43
3.2. Analisis <i>Justica Global</i> melalui Politik Simbolik.....	46
3.3. Analisis <i>Justica Global</i> melalui Politik Pengaruh.....	49
3.4. Analisis <i>Justica Global</i> melalui Politik Akuntabilitas	52
3.5 Analisis Implementasi <i>Justica Global</i> berdasarkan <i>Transnational Advocacy Network</i> 55	
BAB IV	57
PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Poster Film Tropa De Elite karya Jose Padhilla. Error! Bookmark not defined.

Gambar 2. Poster Film Estado Polical Salah Seri Demilitarie Justicia Global di Youtube..... 48

Gambar 3. Maria Da Penha Macena Berkampanye Memperjuangkan Hak Perumahan-nya yang Tergusur Akibat Komplek Olimpiade..... 52

Gambar 4. Poster Kampanye Pembela Hak Asasi Manusia yang Digerakan oleh Indianara Siqueira dan Vitor Lira..... 55



DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CONJUVE	: <i>Conselho Nacional de Juventude</i>
DEFENSORES	: <i>Defensores de Direitos Humanos</i>
DHESCA	: <i>Direitos Humanos, Economicos, Sociais, Culturais e Ambientais</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
INGOs	: <i>International Non-governmental Organizations</i>
JG	: <i>Justica Global</i>
LANPUD	: <i>Rede Latino-Americano e do Caribe de Pesseoas que Usam Drogas</i>
LGBT	: <i>Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGOs	: <i>Non-governmental Organizations</i>
OAS	: <i>Organization of American States</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
TANs	: <i>Transnational Advocacy Networks</i>
UNHCR	: <i>United Nations Human Rights Council</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UPP	: <i>Pacifications Police Units</i>
VISP	: <i>Violencia Institucional e Seguranca Publica</i>

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS UPAYA *JUSTICA GLOBAL* DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI RIO DE JANEIRO TAHUN 2015-2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan



Karina

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhitya Surya Ramadhan

NIM : 15323031

Tugas akhir dengan judul :

ANALISIS UPAYA JUSTICA GLOBAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI RIO DE JANEIRO

2015-2018

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi pada tugas ini adalah hasil karya saya sendiri. Kemudian jika dilain hari terbukti ada beberapa bagian pada karya ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menerima resiko dan konsekuensi apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020.



(Adhitya Surya Ramadhan)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua yang telah membimbing dan menyayangi saya selama ini, yaitu:

Ayahanda (Agus Setiyono, S.E.) dan Ibunda (Dwi Anjani Maroh) yang sangat saya cintai.

Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya, baik secara moral maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa. Segala sesuatu yang sudah Ayahanda dan Ibunda berikan tidak akan bisa tergantikan walaupun dengan setumpuk berlian atau seisi dunia sekalipun. Untuk Ibunda tercinta, terima kasih sudah selalu membimbing dan mengingatkan saya untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai manusia yaitu melaksanakan perintah Allah SWT dan selalu bersikap baik kepada semua orang, serta tidak henti-hentinya mendoakan saya setiap hari. Untuk Ayahanda, terima kasih sudah membimbing saya sebagai lelaki seutuhnya yang harus selalu bertanggungjawab atas pilihan yang saya buat, meskipun engkau seperti tidak peduli dengan apa yang saya lakukan, tetapi dalam diam engkau selalu

khawatir dengan apa yang saya lakukan, dan menanyakan segala hal tentangku pada ibu.

Semoga dengan gelar sarjana S1 yang saya raih mampu menjadikan saya sebagai orang yang berguna di dunia dan menjadi bekal di akhirat kelak. Tentu saja gelar sarjana ini juga nantinya menjadi loncatan yang akan saya gunakan untuk membahagiakan orang tua ketika saya sukses di masa depan nanti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, Aamiin.



HALAMAN MOTTO

*“Setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing, hiduplah di jalanmu,
bukan di jalan orang lain.” – Anonymous*

“Be yourself” – Anonymous

*“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles” – Charlie
Chaplin*

“You’ll never find a rainbow if you’re looking down” – Charlie Chaplin

“You’ll find that life is still worthwhile, if you just smile.” – Charlie Chaplin

*“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought
together.” – Vincent van Gogh*

*“Everythings will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.” – John
Lennon*

*“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.” – Walt
Disney*

*“mungkin saya terlambat, namun hidup harus tetap berjalan dan suatu
saat saya akan mencapai puncak kesuksesan.” – A. Muh. Zulfikry Iskandar*

Oddang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering membuat kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang diberkahi oleh Allah SWT.
3. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sudah memberikan saran dan dukungan dalam mengerjakan skripsi. Mohon maaf apabila selama melakukan bimbingan skripsi dan saat menjadi mahasiswa penulis sering melakukan kesalahan, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan banyak saran dan masukan

dalam penulisan skripsi penulis. Mohon maaf atas segala kesalahan penulis selama menjadi mahasiswa. Semoga bapak selalu diberi kesuksesan, kesehatan, umur yang diberkahi serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A., bapak Irawan Jati, S.I.P., M.H., M.S.S., Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A. dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan penulis banyak berbuat kesalahan. Semoga para dosen-dosen HI UII mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur yang diberkahi serta kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan.
6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih juga yang telah mendengarkan keluh kesah penulis selama masa kuliah.
7. Keluarga besar M. Kurdi, terima kasih atas doa dan dukungannya atas apa yang saya lakukan hingga saat ini, semoga hubungan kekeluargaan kita selalu harmonis dan semoga kita selalu di lindungi Allah SWT.
8. Teman-teman NKBL, yaitu Syaefa Aziz Hakim (Udin) *The Bad Boys*, Wahyu Simalaholo *The Fisherman*, Fadel Chaniago *The Rejected Man*, Bambang *The Love Slave*, Wardhana *The Mountain Sinner*, Putra *The Cave Man*, Kky *The Gamers*, Baso *The Broken Hearted Man*, Raihan *The Happy Kids*, penulis minta maaf kalau ada salah-salah kata saat bertemu dengan

teman-teman sekalian, semoga dengan selesainya skripsi penulis mampu menjadi motivasi bagi teman-teman kontrakan untuk segera menyelesaikan skripsinya masing-masing, karena mengucapkan kalimat **“yaelah, ga usah sih!”** akan terasa lebih nikmat apabila kalian sudah melalui tahap pendadaran. Inov dan Ibe tentunya sebagai penyejuk dan penenang hati dikala penulis mulai mengeluh akan beratnya cobaan hidup. Sukses terus untuk kita semua!

9. Raden Ayu Dea Agustine, terima kasih sudah memberikan motivasi penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih sudah menemani dan mengisi hari-hari penulis selama beberapa tahun terakhir dengan penuh cinta dan kasih sayang.
10. Saudaraku Dika Utama dan para rekan-rekan kontrakan ceria, yaitu Ambon, Ijo, Ragil dan antek-antek lainnya, penulis mengucapkan terimakasih telah mewarnai hari-hari selama tinggal satu atap di Jogja kurang lebih 2 tahun sebelum satu persatu meninggalkan saya lulus duluan, kecuali Ijo.
11. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya.
12. Terima kasih juga, untuk mantan yang sudah pernah mengisi kehidupan penulis dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi

pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brazil beberapa kali ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara *Mega-events* pada beberapa tahun belakangan ini, hal itu menjadikan Brazil semakin ingin memperluas pengaruhnya melintasi Amerika, Afrika, dan tempat lainnya. Komitmen Brazil terhadap perdamaian internasional dan keamanan diakui secara luas. Dalam beberapa tahun terakhir negara ini juga menggalang upaya untuk mengekang kejahatan terorganisir diluar perbatasan dan mengkonsolidasikan keamanan didalam negaranya. Inisiatif ini dihadapi tantangan keamanan dan keadilan yang dialami oleh internal masyarakat Brazil itu sendiri, negara ini mengalami lebih banyak pembunuhan daripada negara lain di dunia. Bersamaan dengan tingkat pembunuhan tinggi, Brazil juga menunjukkan populasi penjara yang meledak. Pemerintah telah mencoba mengadopsi kebijakan pencegahan untuk mengurangi rasa tidak aman dengan berbagai efek (Muggah, 2016).

Brazil mencakup hampir separuh wilayah Amerika Selatan dan memiliki populasi sekitar 170 juta, dengan konsentrasi tinggi penduduk di perkotaan. Perkiraan dari 81,7% masyarakat yang tinggal di perkotaan, terdapat 52 juta anak laki-laki dan perempuan dibawah usia 19 tahun, itu diperkirakan hanya di Rio de Janeiro dan Sao Paulo saja. Terdapat beberapa juta anak yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, kemelaratan inilah yang mendorong anak-anak ke jalan dalam upaya untuk bertahan hidup. Anak-anak tersebut memiliki berbagai pekerjaan, ini termasuk menjual rokok, bunga, koran atau permen karet dan

pengangkut sampah. Beberapa juga terlibat dalam perdagangan narkoba, pencurian kecil-kecilan, perampokan jalanan, dan pelacuran. Anak jalanan adalah sasaran geng narkoba, bagi mereka yang tinggal di jalanan siang dan malam menganggap bahwa hidup itu kejam dan pendek. Pelacuran, penggunaan narkoba, infeksi, dan buta huruf adalah hal biasa. Saat kemiskinan berlanjut, jumlah anak jalanan perlahan meningkat, seperti halnya keterlibatan mereka dalam penggunaan narkoba, pelacuran, kejahatan, dan perilaku berisiko tinggi (United Nations: Office on Drugs and Crime, 2003).

Brazil merupakan salah satu negara paling kejam di dunia, dengan tingkat pembunuhan yang besar seperti di bagian selatan dan Amerika Tengah lainnya. Sebagian besar kekerasan dan kriminalitas itu dapat dikaitkan dengan kelompok kejahatan terorganisir yang berpartisipasi dalam perdagangan narkoba. Perubahan signifikan telah terjadi di Brazil dalam pasar obat-obatan pada dekade terakhir, hal itu mempengaruhi struktur, profil, dan mode operasi kejahatan kelompok terorganisir. Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi global pasar obat-obatan dan peningkatan yang signifikan dari konsumsi obat-obatan di Brazil. Hal ini dikarenakan perbatasan tanah Brazil dengan negara sumber utama produksi kokain yaitu Kolombia, Peru, dan Bolivia. Brazil juga muncul sebagai tempat transit istimewa untuk penyelundupan kokain ke Eropa melalui Afrika Tengah dan Barat (Miraglia, 2016).

Rio de Janeiro telah mengalami peningkatan signifikan dalam kondisi keamanan selama dekade terakhir. Tingkat pembunuhan di kota misalnya, turun dari 32,4% pada tahun 2003 menjadi 18,5% pada tahun 2015. Namun, kondisinya

agak memburuk pada tahun 2016, di bagian kota Rio de Janeiro sendiri melaporkan peningkatan 13,6% dalam kasus pembunuhan dan 27,3% peningkatan perampokan jalanan hanya selama lima bulan pertama pada tahun 2016. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa sementara kejahatan dapat terjadi di tempat atau waktu apapun di Rio de Janeiro pada saat itu, terutama didekat tempat wisata utama, wisatawan sangat rentan terhadap pencurian jalanan pada malam hari. Beberapa atlet Olimpiade yang berlatih atau berpartisipasi dalam acara-acara uji coba di Rio de Janeiro dilaporkan telah dirampok dengan todongan senjata. Beberapa analisis mengaitkan peningkatan kejahatan dan kekerasan baru-baru ini di kota Rio de Janeiro berdasarkan keputusan pemerintah untuk mengurangi anggaran polisi akibat dari kekurangan keuangan. Pemerintah menyatakan situasi keuangan dapat menyebabkan kehancuran total keamanan publik dan layanan lainnya (Elaine H, 2016).

Perdagangan narkoba yang terstruktur telah menjadi bagian dari “perang melawan narkoba” dan memperburuk kekerasan perkotaan. Rio de Janeiro terus mengatasi perdagangan narkoba menggunakan metafora perang. Hal ini menjadikan polisi banyak dikritik karena kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan yang tidak sah dan ditutup-tutupi. Menurut survei yang dilakukan dari 7.2% masyarakat diseluruh perkotaan Brazil, polisi di Rio adalah yang paling tidak dipercaya karena korupsi. Angka itu merupakan 30% dari korban-korban pemerasan secara nasional, upah polisi yang rendah membuat perdagangan narkoba menjadi prospek yang menarik. Pada bulan Desember 2012, sekitar 59 polisi militer Rio ditangkap karena dugaan korupsi dalam perdagangan narkoba (Rekow, 2016).

Justica Global bekerja hampir secara eksklusif untuk mempromosikan hak-hak politik dan sipil, juga merupakan contoh yang bagus dari sebuah NGOs advokasi atau pencari fakta. NGOs atau LSM Hak Asasi Manusia memainkan peran penting dalam menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Kekuatan-kekuatan ini menciptakan harapan bagi banyak orang yang memiliki hak tetapi dilanggar, organisasi-organisasi ini mencari kebutuhan masyarakat dan mencoba untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini akan mengarah kepada analisis bahwa NGOs sangat dipengaruhi oleh negara dan INGOs, meskipun demikian banyak NGOs yang bekerja sesuai dengan norma-norma dan menemukan solusi kreatif untuk suatu permasalahan, hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena organisasi tersebut dapat berperan penting dalam menjaga HAM di Brazil (Daun, 2005).

Justica Global dalam menangani kasus HAM di Brazil mendapatkan dukungan dari INGO's salah satunya adalah *Amnesty International*, organisasi tersebut dalam penelitian bantuannya mengatakan, warisan Olimpiade Rio 2016 telah hancur dengan sedikitnya delapan orang tewas dalam operasi polisi di kota itu selama Olimpiade dan protes damai sangat ditekan. Sejak persiapan *venue* Olimpiade orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tersebut juga telah melaporkan HAM lainnya seperti invasi rumah, ancaman langsung dan agresi fisik dan verbal oleh polisi. Pada tahun 2016, pembunuhan oleh polisi di Rio meningkat dari bulan ke bulan saat kota bersiap untuk menyambut dunia. Menurut Institusi Keamanan Publik Negara Bagian Rio de Janeiro, polisi di kota itu menewaskan 35 orang pada April 2016. Para pengunjung rasa telah ditekan dengan keras oleh polisi,

baik didalam maupun diluar arena olahraga. Demonstrasi publik yang berlangsung damai di Rio de Janeiro pada 5 dan 12 Agustus disambut dengan kekerasan polisi, termasuk penggunaan senjata yang kurang mematikan seperti gas air mata granat setrum. Beberapa lainnya dikeluarkan dari arena kompetisi karena memegang spanduk atau mengenakan kaus dengan pesan protes.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang masalah, maka tulisan ini akan mengkaji lebih dalam untuk menjawab **Bagaimana upaya NGOs (*Justica Global*) dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran HAM di Rio de Janeiro tahun 2015-2018?**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya NGOs dalam menangani tingkat kriminalitas yang tinggi di Brazil.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis tentang tingginya tingkat pelanggaran HAM di Brazil menjelang pagelaran *Mega Sporting-Events* seperti Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Seperti yang kita ketahui bahwa Brazil merupakan salah satu negara dengan kasus kriminalitas dan pembunuhan terbanyak di dunia. Faktor kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat di Brazil melakukan tindakan terlarang dan berbahaya tersebut. Brazil yang merupakan tempat transit istimewa

bagi negara lain dalam pengiriman narkoba, menjadi salah satu faktor tingginya tingkat pembunuhan, menjadikan pemerintah Brazil kewalahan, dan menjadikannya suatu alasan sebagai penyebab tingginya tingkat pembunuhan di wilayahnya tersebut. Terdapat beberapa penelitian mengenai permasalahan kejahatan dan pembunuhan di Brazil, akan tetapi belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana upaya NGOs dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Brazil menjelang *Mega Sporting-Events* seperti Olimpiade Rio de Janeiro 2016 berlangsung, mengingat akan banyak masyarakat internasional yang mengunjungi Brazil. Tingginya tingkat pelanggaran HAM di Brazil akan mengancam kenyamanan dan keselamatan masyarakat internasional itu sendiri. Maka dari itu penelitian ini menjadi penting karena akan membahas upaya NGOs yang di tulisan ini lebih spesifiknya *Justica Global* dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran HAM di wilayah Brazil.

1.5. Cakupan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah, upaya *Justica Global* dalam menangani pelanggaran HAM yang terus terjadi sebelum *Mega Sporting-Events* dan juga setelahnya, sekitar tahun 2012-2018. Penelitian ini merupakan kajian hubungan internasional yang berfokus kepada studi HAM, melihat akan banyaknya pengunjung dari berbagai penjuru negara datang ke Brazil, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan bagi masyarakat internasional melihat citra Brazil yang dikenal dengan tingkat kejahatannya yang tinggi, terlebih sebagian hal itu banyak kaitannya dengan kejahatan dan pembunuhan atau pelanggaran HAM.

1.6. Tinjauan Pustaka

Juliana de Oliveira Carlos (2015) menerangkan dalam tulisannya, kebijakan narkoba Brazil terutama pada Undang-undang Narkoba Baru 2006, Undang-undang tersebut memberikan perubahan penting pada undang-undang narkoba sebelumnya, undang-undang ini tidak memberikan kriteria obyektif untuk menetapkan apakah pelanggar harus dianggap sebagai pengguna, sebagai pedagang tingkat rendah atau pedagang tingkat tinggi dalam kasus kriminal tertentu. Prosedur hukum sengaja tidak jelas dan dalam prakteknya, definisi itu ditentukan oleh keadaan sekitar. Brazil telah meratifikasi ketiga konvensi narkoba internasional yang mewakili negara-negara anggota PBB untuk menguraikan kebijakan dan legislasi nasional mereka di bidang pengawasan narkoba. Hasil dari itu semua adalah diwajibkannya bagi negara-negara anggota untuk mengadopsi sanksi pidana terhadap produksi dan perdagangan obat-obat terlarang (khususnya ketika dilakukan secara internasional).

Robert Muggah (2016) dalam penelitiannya menuliskan, Brazil menghadapi beberapa ancaman signifikan dalam hal keamanan domestik. Kelompok kriminal terorganisir merupakan salah satu permasalahan terbesar di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, kelompok-kelompok itu terlibat dalam perdagangan narkoba transnasional, perdagangan senjata, perampokan, pemerasan, dan penculikan. Dalam hal ini Brazil secara sadar mengadopsi pendekatan regional untuk mencegah kejahatan terorganisir. Brazil secara historis berinvestasi dalam pendekatan multilateral untuk mempromosikan keamanan dan keadilan di Amerika Selatan. Sejalan dengan insting multilateralnya, Brazil telah meratifikasi sebagian besar instrumen

internasional dan regional yang dimaksudkan untuk memerangi kejahatan terorganisir dan mempromosikan keamanan dan keadilan. Tetapi dalam hal itu, menandatangani dan meratifikasi perjanjian hanyalah langkah pertama, dimana implementasi dan kepatuhan merupakan masalah yang lainnya.

Nathalia (2018) dalam tulisannya menjelaskan bahwa dibentuknya *Secretaria Nacional de Juventude* (Sekretariat Pemuda Nasional), bertujuan mengubah paradigma dan pengembangan kebijakan publik untuk pemuda antara 2003 hingga 2016. Adopsi Undang-undang pemuda dan kebijakan sosial selama periode itu memiliki dampak langsung tentang kehidupan ribuan pemuda di Brazil. Upaya dalam membuat hubungan antara kebijakan narkoba, kejahatan dan remaja, dibentuk juga kelompok kerja mengenai kebijakan narkoba yang ditetapkan oleh *Conselho Nacional de Juventude* (CONJUVE, atau Dewan Pemuda Nasional, ruang untuk partisipasi sosial terkait dengan Sekretariat Pemuda Nasional). CONJUVE bertanggung jawab atas seminar yang berjudul “Otonomi, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia untuk pemuda: Perlunya diciptakan kembali kebijakan tentang narkoba”. Pada kesempatan itu, antropolog Luana Malheiro, sebagai salah satu penyelenggara acara dan anggota *Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usam Drogas* (LANPUD, atau jaringan orang Amerika yang menggunakan narkoba di Amerika Latin dan Karibia) menyatakan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk membuat upaya membangun kemungkinan debat dengan berbagai aktor pemuda tentang perjuangan perang melawan narkoba.

Veronica (2017) menulis dalam penelitiannya, *The Police Pacifying Units* (UPP) merupakan program keamanan publik baru di Brazil. Pada peresmian yang

pertama, Presiden dan Gubernur Rio secara terbuka mengatakan bahwa tindakan kejahatan terorganisir dianggap sebagai tindakan terorisme. Dengan mengamankan masalah ini, mereka mengklarifikasi krisis dalam keamanan publik di Rio sebagai suatu ancaman utama. Hal itu difokuskan untuk memastikan keamanan Brazil yang akan datang dan untuk keamanan selama Olimpiade. Bahkan ketika diterapkan untuk pertama kalinya, UPP tidak semata-mata merupakan kebijakan yang ditargetkan sebagai bagian dari persiapan Brazil untuk Piala Dunia ataupun Olimpiade. Tujuan utamanya adalah mendapatkan kembali kendali atas kekerasan atau kejahatan untuk membangun kekuasaan atas mereka (UPP).

Penelitian yang dilakukan oleh Jason Eligh (2019) mengatakan, perdagangan narkoba Afrika mulai memperluas batas-batasannya pada tahun 1952. Melihat perkembangan itu, tidak lama Afrika runtuh karena peningkatan pesat dalam produksi, penggunaan, dan perdagangan lokal, tepatnya di Afrika Selatan bersamaan dengan runtuhnya sistem apartheid. Meski demikian, obat-obatan di Afrika terus meningkat dan memperluas hubungan mereka dengan kelompok kriminal asal Amerika Latin dan Asia. Koneksi Kokain antara Afrika Barat dan pemasok Amerika Latin diperluas pada tahun 2000-an. Melihat pertumbuhan itu *UN Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengeluarkan pernyataan yang memperingati bahwa perdagangan narkoba yang melewati wilayah rentan atau belum pernah terlibat permasalahan narkoba, itu disebut menyesatkan ekonomi wilayah tersebut. Direktur eksekutifnya memperingati bahwa ini lebih dari sekedar masalah narkoba, melainkan ini merupakan ancaman bagi kesehatan dan keamanan masyarakat.

Beberapa tulisan yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan penelitian-penelitian tersebut memiliki pandangan yang hampir mirip yaitu terhadap penanggulangan kriminalitas di wilayah Amerika Latin dan sekitarnya, dan tentu juga mengenai penanggulangan pembunuhan seperti yang diakibatkan karena urusan narkoba. Pembuatan kebijakan atau peningkatan sistem-sistem keamanan negara merupakan sebagian alternatif yang digunakan, dengan harapan dapat terselesaikan atau paling tidak berkurangnya permasalahan kejahatan dan pembunuhan itu sendiri. Dalam skripsi ini penulis akan membahas atau meneliti lebih lanjut mengenai upaya NGOs dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Brazil, tepatnya menjelang Olimpiade dan acara-acara mega. Mengingat penanggulangan kriminalitas dan kejahatan di Brazil sebagai salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia yang cukup besar.

1.7. Landasan Konseptual

Transnational Advocacy Networks (TANs)

Jenis-jenis kelompok yang menjadi ciri jaringan advokasi bukanlah hal baru, beberapa sudah ada sejak abad kesembilan belas untuk penghapusan perbudakan buruh. Namun, jumlah, ukuran, profesionalisme, kepadatan serta kompleksitas hubungan internasional mereka telah tumbuh secara dramatis dalam tiga dekade terakhir, sehingga baru-baru ini kita dapat berbicara tentang jaringan advokasi transnasional. Jaringan advokasi transnasional paling mungkin muncul disekitar isu-isu seperti, saluran kelompok domestik dan pemerintah mereka terhambat atau terputus dimana saluran seperti itu tidak efektif untuk

menyelesaikan konflik, aktivis atau pengusaha politik percaya jaringan akan memajukan misi mereka dan secara aktif mempromosikannya, konferensi internasional dan bentuk kontak internasional lainnya menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Margaret E. Keck, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, 1999).

Hal ini memperlihatkan penelitian investigatif tentang *Transnational Advocacy Networks* merupakan cara yang tepat untuk menganalisis kapasitas mereka untuk aksi politik dan dampaknya terhadap perubahan, juga pada perilaku negara mengenai Hak Asasi Manusia. Untuk menganalisis strategi Jaringan Advokasi Transnasional, perlu ditekankan bahwa peran politik organisasi-organisasi ini harus diuraikan, terutama oleh kampanye mereka. Menurut Keck dan Sikkink, kampanye adalah “kegiatan yang terkait secara strategi dimana anggota jaringan mengembangkan ikatan dan peran yang diakui bersama dalam mencapai tujuan bersama”. Kampanye merupakan proses pembangunan topik dalam konteks tertentu, dengan tujuan mempromosikan perubahan substantif disuatu daerah, dan yang dikembangkan oleh NGOs atau LSM Hak Asasi Manusia sering berfokus pada suatu negara dan masalah tertentu, seperti penyiksaan atau hukuman mati (Silva, 2017).

Transnational Advocacy Networks menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink merupakan aktor-aktor skala internasional yang bekerja dalam suatu isu, para aktor ini digabungkan berdasarkan nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat. Aktor-aktor ini bekerja sama dalam mengangkat isu ataupun norma-norma dan fenomena baru dengan terorganisir.

Menurut Keck dan Sikkink konsep *Transnational Advocacy Network* juga mempunyai keunikan tersendiri karena mereka mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma dengan terorganisir, serta tidak jarang individu pun ikut terlibat dalam mengadvokasi perubahan kebijakan.

Aktor-aktor yang berada dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, jaringan tersebut menjadi semakin penting karena dari cara mereka dalam melakukan advokasi memiliki keunikan. Mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu-isu seperti lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia ataupun sebagainya. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk ke dalam arena tersebut dengan membawa suara dan kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Artinya, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut mendapat perhatian dan didengar.

Konsep *Transnational Advocacy Networks* memiliki tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi yaitu, NGOs yang berskala nasional ataupun internasional, *local social movements*, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi *regional* dan *intergovernmental*, serta badan eksekutif parlemen dari suatu pemerintah. Semua aktor belum tentu dibutuhkan dalam membentuk sebuah Jaringan Advokasi Transnasional, hanya berdasarkan beberapa aktor saja jaringan sudah dapat terbentuk dan berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas dan *local social movements* adalah aktor dengan peran paling besar menurut konsep TANs ini.

Jaringan transnasional mencari pengaruh dalam banyak cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya, tetapi karena mereka tidak kuat dalam pengertian tradisional, mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai dimana negara membuat kebijakan. Meskipun banyak dari apa yang dilakukan jaringan dapat dianggap persuasi, istilah ini kurang tepat untuk digunakan secara teoritis, pengembangan tipologi telah dilakukan dan lebih bernuansa tentang jenis taktik yang digunakan jaringan, yaitu:

- a. *Information Politics*, yaitu kemampuan untuk memindahkan dan mengembangkan informasi yang dapat digunakan secara politis dengan cepat dan tepat ke arah yang akan memiliki pengaruh paling besar.
- b. *Symbolic Politics*, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan atau cerita yang masuk akal dan mewakili suatu isu yang akan dibawa kepada masyarakat luas.
- c. *Leverage Politics*, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi situasi dimana anggota jaringan yang lebih lemah tidak mungkin memiliki pengaruh, sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut.
- d. *Accountability Politics*, yaitu upaya untuk mewajibkan aktor yang lebih kuat untuk menjaga, mengawasi atau bertindak berdasarkan kebijakan-kebijakan atau prinsip yang telah sesuai dengan tujuan mereka.

Transnational Advocacy Networks merupakan penghubung antara aktivis di negara maju dengan negara berkembang ataupun dari negara lainnya, hubungan semacam ini biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku negara. Ketika hubungan antara aktor negara dan domestik terputus, NGOs domestik dapat secara langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba menekan negara mereka dari luar. Strategi ini disebut dengan "*Boomerang Pattern*", hal ini merupakan pengaruh dari jaringan transnasional dimana target dari kegiatan mereka ini adalah mengubah perilaku negara. Kampanye atau mempromosikan Hak Asasi Manusia adalah hal yang paling umum dalam pola ini, sama halnya dengan kampanye hak-hak adat dan kampanye lingkungan yang mendukung tuntutan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan yang akan mempengaruhi mereka. Pemerintah biasanya tidak responsif terhadap kelompok-kelompok domestik, maka kontak internasional dilakukan agar dapat memperkuat tuntutan kelompok domestik, membuka ruang terbuka untuk isu-isu baru, dan kemudian menyuarakan atau menggemakan tuntutan-tuntutan ini kembali ke arena domestik. Suatu kasus yang menggunakan strategi ini biasanya secara politis dapat dikatakan sensitif dan dikenakan tuduhan campur tangan asing dalam urusan domestik (Margaret E. Keck, 1998).

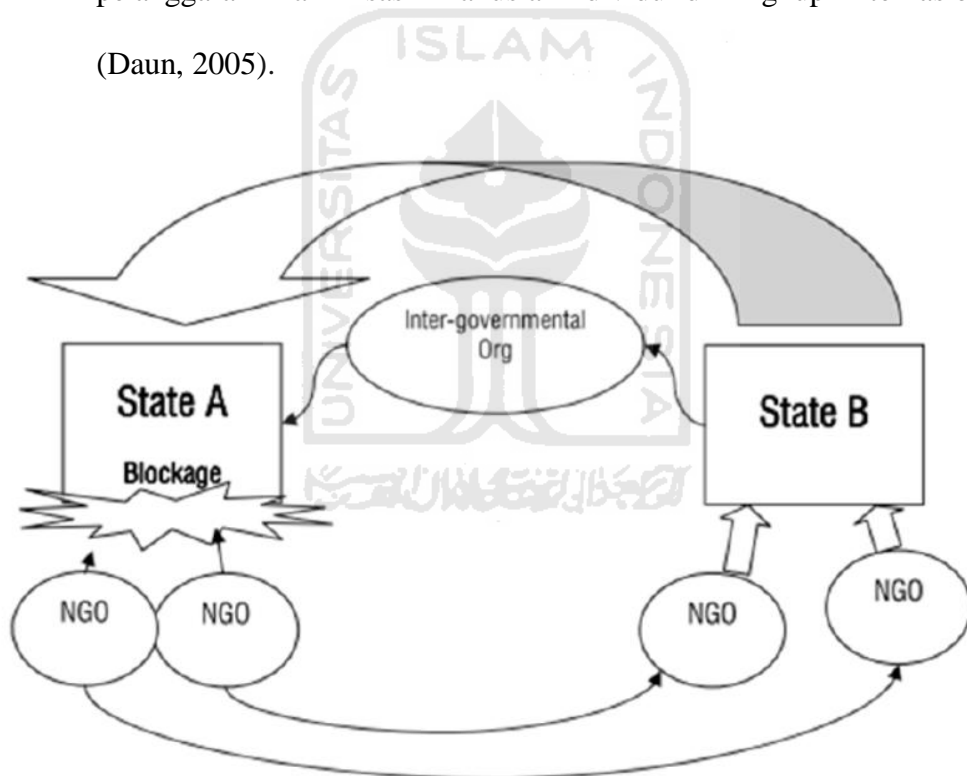
Konsep ini digunakan untuk menganalisis permasalahan Hak Asasi Manusia di Brazil tepatnya Rio de Janeiro, beberapa gambaran tentang penerapan konsep ini adalah penyajian laporan tentang Hak Asasi Manusia untuk mengancam pelanggar Hak Asasi Manusia dan bekerja sama dengan pengacara untuk mengirim informasi ke pengadilan internasional, dan melalui pengadilan mereka akan

mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan publik. Mereka juga bekerja sama dengan para pembela Hak Asasi Manusia, selain mempromosikan Hak Asasi Manusia melalui mekanisme internasional, mereka menghasilkan laporan tentang situasi Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Contohnya seperti, *Justica Global* mengambil bagian dari jaringan internasional dan lembaga lain yang bekerja dengan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional, *Justica Global* dianggap memiliki kredibilitas yang kuat, dan media Brazil memberi mereka banyak paparan. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah penelitian dan mereka memiliki peneliti yang akan melakukan penelitian lapangan untuk laporan mereka. Fokus mereka adalah kekerasan dan pembela Hak Asasi Manusia, tetapi mereka juga mengambil kasus lain apabila diperlukan. Staf mereka adalah pengacara atau sosiolog, mereka juga menawarkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dalam bentuk pelatihan pengacara dalam hukum dan mekanisme Hak Asasi Manusia internasional, juga bagaimana menggunakan media secara efektif dalam advokasi Hak Asasi Manusia (Daun, 2005).

Tujuan organisasi dalam konsep ini adalah:

- Untuk melatih organisasi Hak Asasi Manusia Brazil dapat memanfaatkan mekanisme internasional dalam melindungi Hak Asasi Manusia.
- Untuk mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk di bidang konflik dan menghadirkan kecaman melalui komunikasi dengan organisasi Hak Asasi Manusia internasional lainnya.

- Untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum Hak Asasi Manusia internasional.
- Untuk memberi saran kepada NGOs Brazil bagaimana mengakses media nasional dan internasional.
- Untuk memperkuat jaringan internasional Hak Asasi Manusia dalam membantu organisasi Brazil.
- Untuk menjamin dan mewakili para korban dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia individu di lingkup internasional (Daun, 2005).



Gambar 1.7.1 Penggambaran Konsep TAN melalui *Boomerang Pattern*.

Justica Global adalah NGOs Hak Asasi Manusia yang bekerja dengan perlindungan dan promosi Hak Asasi Manusia, juga penguatan masyarakat sipil dan

demokratis. Dalam hal ini, tindakan Justica Global bertujuan untuk mengancam pelanggaran HAM, fokus pada proses perumusan kebijakan publik berdasarkan hak-hak dasar, mempromosikan penguatan lembaga-lembaga demokratis, dan menuntut jaminan hak bagi para korban pelanggaran HAM. Justica Global melakukan pekerjaan penelitian dan dokumentasi pelanggaran HAM yang ketat dan sistematis, publikasi laporan dan penggunaan mekanisme HAM internasional dikombinasikan dengan komunikasi yang kuat dan strategi pers.

Justica Global memiliki strategi yang salah satunya adalah advokasi, dimana itu merupakan artikulasi politik, partisipasi dalam jaringan dan pemantauan kebijakan publik tentang Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah, produksi laporan tematik atau regional, pengumpulan informasi yang sistematis, tindak lanjut dari kasus-kasus yang patut dicontoh, pelaksanaan misi lapangan dan penelitian lapangan secara intensif, wawancara langsung dengan para korban dan pencarian prioritas sumber-sumber primer. Justica Global memiliki dukungan atau bekerjasama dengan INGOs, salah satunya yaitu Ford Foundation yang akan menjadikannya lebih kuat dan memiliki pengaruh (Justica Global, 2020).

1.8. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara untuk menyelesaikan masalah penelitian secara sistematis, hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah, kita dapat mempelajari langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitiannya bersama dengan logika dibelakangnya, peneliti perlu mengetahui metode atau teknik, mana

yang relevan dan mana yang tidak, juga apa yang mereka maksud dan tunjukkan. Peneliti perlu memahami asumsi yang mendasari berbagai teknik dan mereka perlu mengetahui kriteria yang dengan itu mereka dapat memutuskan bahwa teknik dan prosedur tertentu akan berlaku untuk masalah tertentu (Khotari, 2004).

Berkaitan dengan pemahaman metode penelitian yang dibahas sebelumnya, dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas, agar hasil dari penelitian dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu disini penulis akan menjabarkan tentang metode apa yang digunakan untuk menyusun penelitian sehingga dapat disimpulkan nantinya, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai media untuk menguraikan data yang akan diambil. Penulis melakukan penelitian yang sebagian besar menggunakan buku, jurnal, dan media *online* untuk mengumpulkan data.

Penelitian sangat diperlukan untuk menemukan fakta-fakta baru dalam suatu permasalahan, menurut beberapa peneliti seperti Easterby-Smith, Thrope dan Jackson, terdapat empat fitur utama dalam penelitian. Pertama, Ontology yang merupakan bagaimana peneliti melihat dan berasumsi tentang permasalahan yang akan diteliti. Kedua, Epistemology yang merupakan cara peneliti dalam menyelidiki suatu permasalahan yang terjadi. Ketiga, Metodologi yaitu cara peneliti menggabungkan teknik penelitian untuk membuat keserasian gambaran suatu permasalahan. Keempat, Metode dan Teknik yang merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data dan penyelidikan masalah. Seperti yang telah ditulis sebelumnya bahwa penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana paradigma utama penelitian kualitatif adalah paradigma positivis, interpretivis, dan

kritis. Hal itu digunakan untuk mengeksplorasi perilaku, perspektif, pengalaman orang, dan apa yang menjadi inti kehidupan mereka (Mohajan, 2018).

1.8.1 Metode Studi Pustaka

Metode ini merupakan salah satu jenis dari bagian penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal baik dari berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Seorang peneliti harus selektif dalam mencari sumber bacaan, sebab tidak semua dapat dijadikan sebagai sumber data. Sumadi Suryabrata paling tidak terdapat dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu, prinsip kemutakhiran (*recency*), dan prinsip relevansi (*relevance*). Terkecuali untuk penelitian historis, perlu dihindarkan sumber bacaan yang sudah lama, karena sumber yang sudah lama mungkin memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sudah tidak berlaku lagi, karena kebenarannya telah dibantah oleh teori yang lebih baru (Harahap, 2014).

1.8.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode penelitian yang mengharuskan penulis mencari data melalui naskah-naskah kearsipan seperti dalam bentuk barang cetakan atau rekaman, gambar atau foto, blueprint, dan lain-lain. Berdasarkan data tersebut, maka penulis akan dapat memecahkan suatu permasalahan dalam penelitiannya sekaligus dapat membuktikan hipotesis penelitiannya.

Skripsi ini menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa data-data resmi Pemerintahan dan NGOs tentang tingkat kriminalitas dan pembunuhan yang tinggi di Brazil berdasarkan tahun penelititannya. Video dan gambar juga dilibatkan untuk menjadi sumber data dan referensi dalam pengambilan data, tentu hal itu berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya.

1.8.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti terdapat analisa mengenai isu yang dibahas secara deskriptif. Maka dari itu, diperlukan beberapa langkah untuk menyelesaikan proses penelitian. Pertama, yaitu pengumpulan data-data tentang tingginya tingkat pelanggaran HAM di Brazil, data ini diperoleh melalui dua tipe metode, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Dalam studi pustaka, data yang diperoleh atau digunakan itu merupakan data sekunder yang didapatkan melalui perantara seperti buku, jurnal, *website*, maupun berita. Dalam hal ini metode dokumentasi juga bersifat sekunder, artinya penulis atau peneliti mendapatkan referensi dari beberapa data terkait tingkat pelanggaran HAM yang tinggi di Brazil juga mengenai beberapa penyebabnya. Dalam proses pengambilan data ini, penulis akan mengkaji sumber referensi dan akan mengambil secara garis besar apa yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Kedua, penulis akan menuliskan upaya yang dilakukan NGOs dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran HAM di Brazil juga respon Pemerintah terhadap kasus tersebut. Ketiga, penulis akan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan NGOs di Brazil dalam penyelesaian masalah tersebut dan juga respon Pemerintah dalam menangani kasus

tersebut. Keempat, penulis akan mendapatkan hasil atau kesimpulan dari penelitian ataupun skripsi ini.



BAB II

PELANGGARAN HAM PEMERINTAH BRAZIL DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DI RIO DE JANEIRO

2.1. Pemerintah Brazil dalam Menyikapi Kemiskinan di Rio de Janeiro

Brazil merupakan negara terbesar dan dapat dikatakan paling berpengaruh di Amerika Selatan, hal ini menjadikan Brazil sebagai negara dengan populasi terbanyak ke-5 di dunia, mencapai 176 juta penduduk. Rio de Janeiro adalah satu dari kota-kota di Brazil yang akan dibahas, Rio de Janeiro merupakan salah satu kawasan dengan tingkat ketimpangan masyarakatnya sangat mencolok. Rio de Janeiro adalah kota terbesar kedua dalam populasinya, dan memiliki sekitar 5.550.000 penduduk (Lydia Richardson, 2005). Orang-orang Afro-Brazil banyak pindah ke perkotaan untuk keluar dari kemiskinan dan menetap di pemukiman informal yang dikenal sebagai favela, akibat dari urbanisasi yang cepat ditambah dengan penurunan ekonomi secara umum, Rio de Janeiro tumbuh dengan cepat dan hampir setengah dari populasi berada di tingkat ekonomi yang rendah. Hal itu memperburuk ketidaksetaraan kekayaan yang ada dan menjadikan Rio de Janeiro sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar (Fiori, 2000).

Hal yang paling mencolok dari ketimpangan pendapatan di Brazil adalah, sosial ekonomi yang besar perbedaannya antara kelompok populasi berdasarkan warna kulit. Pendapatan rata-rata per-kapita orang Afro-Brazil hanya setengah dari orang kulit putih, sekitar 33% orang Afro-Brazil tinggal di dalam kehidupan yang miskin dan pendapatannya tidak lebih dari 50% pendapatan rata-rata negara. Beberapa kemungkinan penjelasan untuk tingkat kemiskinan yang berbeda antara

kelompok ras, orang kulit berwarna jelas terwakili dalam kelompok-kelompok dengan resiko lebih tinggi berada dibawah garis kemiskinan. Memang jika dibandingkan dengan kulit putih, orang dengan kulit berwarna lebih sering keluar dari sistem pendidikan lebih awal dan lebih sering bekerja di pekerjaan dengan gaji rendah (Gradin, 2007).

Brazil juga merupakan negara dengan tingkat kejahatan dan kekerasan yang tinggi, negara itu masuk ke dalam daftar negara dengan kasus pembunuhan terbanyak. Para peneliti di Brazil sering menggunakan tingkat pembunuhan sebagai barometer kejahatan serius dan kekerasan, pembunuhan umumnya dianggap sebagai kejahatan paling serius. Antara tahun 1980 dan 2002, tingkat pembunuhan di Brazil meningkat lebih dari dua kali lipat, pembunuhan-pembunuhan di negara tersebut terfokus kepada kalangan pria muda. Tidak ada hubungan yang jelas antara tingkat pendapatan dan pembunuhan di kawasan negara bagian, tetapi dilingkungan kawasan dengan penduduk yang pendapatan rumah tangganya rendah, ditandai dengan tingkat pembunuhan yang tinggi. Kejahatan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Brazil, diperkirakan biaya kejahatan dalam kota dan negara bagian di Brazil berkisar antara 3 hingga 5 persen dari PDB per tahun (World Bank, 2006).

Konstitusi UPP sebagai kebijakan publik adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan kota yang akan menjadi tuan rumah mega-acara. Oleh karena itu, untuk menjamin kota agar aman dalam setiap bidangnya seperti masyarakat dan wilayahnya, UPP beberapa kali mengumumkan strategi yang disebut sebagai wilayah “yang dikuasai” dengan tujuan untuk membentuk atau

mengantisipasi peristiwa di sekitar acara-mega tersebut (Araujo, 2012). Pada tahun awal-awal implementasi UPP, hasilnya dipandang sebagai jalan keluar dari masalah kekerasan perkotaan, dengan Rouseff berjanji untuk memperluas bentuk perpolisian komunitas ke semua wilayah negara dalam kampanye kepresidenannya. Namun, kebijakan tersebut runtuh setelah Piala Dunia, dengan beberapa laporan menyoroti kematian di lokasi dan penyalahgunaan oleh polisi.

Piala Dunia di Brazil mengikuti pola yang dilakukan negara-negara lain dalam menyelenggarakan mega-acara, seperti pengusiran masyarakat-masyarakat miskin di kota “penduduk favela” misalnya. Penduduk favela dekat stadion Maracan Rio berulang kali akan digusur ”sebelum pemerintah mengecat rumah-rumah penduduk yang akan dihancurkan tanpa peringatan sebelumnya”. Warga diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke pemukiman di Cosmos, dipinggiran Rio de Janeiro tanpa tawaran kompensasi. Laporan yang sama dari 2012 dicatat bahwa dalam persiapan untuk Piala Dunia dan Olimpiade, pemerintah melakukan pengusiran paksa terhadap komunitas dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan (Terrance Carroll, 2012).

Kemiskinan di Brazil dianggap sebagai sesuatu yang tidak diragukan lagi oleh beberapa penulis, mereka biasanya dikaitkan dengan perampasan waktu, perampasan sumber daya moneter seperti sanitasi, pendidikan dan kesehatan (Lilian Lopes Ribeiro, 2015). Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan secara permanen, bagaimanapun adalah usaha jangka menengah dan panjang. Hal ini membutuhkan perubahan penentu struktural produktivitas tenaga kerja secara konsisten selama dua hingga tiga dekade. Sementara itu, ekonomi perlu tumbuh

dengan mantap agar menghasilkan lapangan kerja dan peluang bagi tenaga kerja yang lebih berkualitas. Perubahan ini harus dicapai dalam ekonomi makro yang stabil karena ketidakseimbangan ekonomi utama dapat dengan cepat menyapu pendapatan riil keuntungan (Herran, 2015).

Menjadi tuan rumah acara besar sering kali atau bahkan selalu menjadi proyek elit mega politik untuk membentengi negara dan merekayasa transformasi masyarakat (Cornelissen, 2011). Dengan demikian, acara-acara besar secara retorik melegitimasi pemindahan paksa sejumlah komunitas miskin tanpa kompensasi yang adil atau relokasi yang layak (Araujo de Assumpcao, 2012). Lebih dari 170.000 keluarga di Brazil telah dilanggar hak kepemilikan rumahnya menjelang Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016. Penggusuran paksa yang dilakukan berlawanan dengan hukum hak asasi manusia baik di Brazil maupun internasional, hal itu termasuk bagian dari rencana pembangunan stadion baru, infrastruktur transportasi dan untuk menjamin keamanan acara tersebut. Penggusuran yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan acara besar biasanya berlanjut setelahnya, hal ini dilakukan untuk menyusun kembali lanskap perkotaan (Davis, 2011).

Di balik mewahnya penyelenggaraan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 terdapat penggusuran yang menyebabkan 4.120 keluarga kehilangan tempat tinggal. Kondisi tersebut membuat ribuan anak terancam terlantar, tidak dapat mengakses pendidikan, serta kehilangan jaminan kesehatan. Koalisi politik ditambah kepentingan perusahaan mempercepat penggusuran. Kepentingan itu akan diubah menjadi hal yang menguntungkan untuk pengembangan perumahan kelas menengah dan atas (Watts, 2015).

Penggusuran ini dilakukan berdasarkan kebijakan relokasi penduduk termiskin, pemerintah berencana menjadikan wilayah kumuh menjadi *real estate* dan peluang bisnis. Akan tetapi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan tindakan kekerasan. Situasi masyarakat yang terancam, menghadapi ketidakpastian, kurangnya informasi, dan terorisme psikologis yang dilakukan oleh pemerintah sebagai strategi untuk memungkinkan pemindahan (Michel, 2012).

Proyek pembangunan Rio Olympics Park diprakasai oleh Carlos Carvalho yang memiliki tanah seluas 64 juta meter persegi di Kota Barra. Carlos bekerja sama dengan walikota Barra, Eduardo Paes dalam membangun kompleks elit. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Rio dan *real estate developer* yakni terdapat ribuan rumah warga yang berada disekitar area proyek. Pembangunan kawasan elit dilakukan untuk menarik investasi di Rio sebagai kota diadakannya Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016 (Mantelli, 2015, p. 112). Penggusuran dilakukan tanpa pemberitahuan terdahulu, kurangnya informasi yang resmi menyebabkan bentrokan antar polisi dan warga lokal (Vox, 2016).

Pengamanan favela juga merupakan bagian dari warisan peristiwa besar. Dalam praktiknya, hal itu bertujuan tidak hanya untuk mengurangi kekerasan perkotaan tetapi juga untuk memungkinkan negara menerapkan tatanan sosial dan perubahan infrastruktur. Namun, bertentangan dengan klaim resmi, setelah UPP didirikan di favela, perbaikan sosial malah justru diabaikan dari prioritas utama (Goncalves Soares, 2006). Pasifikasi yang dilakukan sebetulnya lebih mengarah kepada strategi untuk mencapai kecantikan favela dari pandangan pada saat

mega-acara, tetapi tidak untuk mewujudkan perbaikan yang berarti dalam kesejahteraan sosial (Vieira da Cunha, 2012).

Rio de Janeiro terus mengatasi masalah perdagangan narkoba di favelas menggunakan metafora perang, melalui konfrontasi militer yang agresif dan menghasilkan kesadaran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi sipil dan pemerintah dalam kemampuan mereka untuk mengelola atau mengurangi kejahatan dan kekerasan (Marcelo B, 2011). Tidak hanya pertempuran antara polisi dengan geng narkoba, ledakan milisi keamanan dan mantan pasukan keamanan juga mengendalikan wilayah favela dengan cara yang sama yaitu dengan kekerasan (Folha de Sao Paulo, 2014). Polisi juga telah banyak dikritik karena kekerasan, penyiksaan, pembunuhan yang tidak sah dan ditutup-tutupi. Beberapa diantaranya bahkan diturunkan jabatannya sebagai komandan UPP karena keterlibatan mereka dalam skandal korupsi (O Dia, 2011).

Campur tangan militer belum membuat perbaikan yang signifikan terhadap bentrokan bersenjata yang sering mewabah di Rio de Janeiro, tujuan sebenarnya adalah lebih kepada melemahkan koneksi antara kebijakan keamanan dan tata kelola daerah yang terpinggirkan. Negara meninggalkan strategi sebelumnya dan membangun ketertiban di favela berdasarkan kebijakan publik, layanan negara dan pengembangan sosial ekonomi. Tujuan utama politik lokal ini adalah sebagai pendorong keberhasilan awal strategi pengamanan yang telah menggunakan angkatan bersenjata, sebagai suatu instrumen dari tujuan stabilitas yang lebih luas dan dasarnya bersifat politis (Ramos, 2016).

2.2. *Pacifications Police Units (UPP)* dalam Mengatasi Kemiskinan di Rio de Janeiro

Program UPP telah menempuh jalan panjang dalam mencapai tujuannya meningkatkan keamanan di favela. Khususnya, jumlah kejahatan mematikan yang terdaftar. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi dari program UPP dilaksanakan, baku tembak telah berakhir. Namun, masyarakat mengkonfirmasi bahwa kriminalitas masih tetap saja terjadi. Warga merasakan ketakutan bahwa para penjahat bersenjata akan mengambil kendali di masa yang akan datang, melihat hubungan antara polisi dan penduduk di favela masih ditandai dengan ketidakpercayaan (Koonings K, 2012). Pemerintah telah melanggar terlalu banyak janji di masa lalu sehingga warga mempertanyakan durasi program UPP, karena ditakutkan kembalinya penjahat bersenjata. Masyarakat banyak berpendapat bahwa UPP adalah kebijakan sementara yang dimaksudkan untuk mengekang kekerasan sebelum mega-acara, dan akan segera memudar setelahnya. Warga-warga favela juga takut bahwa dukungan politik untuk program UPP menurun setelah adanya pemilu (Cano, 2012).

Pola pertanggungjawaban yang salah tempat menandai bahwa pengamanan yang dilakukan tidak membahas ketidakamanan dan kerentanan warga yang membutuhkan, hal ini mendukung argumen tentang negara yang tidak menghormati hak-hak sipil, khususnya mereka masyarakat miskin yang sudah mendarah daging akibat dari sitem peradilan (Caldeira, 2002). Dibandingkan dengan program yang diprakarsai selama dekade terakhir, invasi keras militer Rio dan kegagalan pemolisian masyarakat membutuhkan lebih banyak sikap progresif dan

berkelanjutan pada informalitas perkotaan dan kekerasan. Program ini menunjukkan ketidakkonsistenan, karena kekerasan performatif oleh petugas polisi terus berlanjut (Wacquant, 2008). Kurangnya komitmen dari petugas UPP mengakibatkan keraguan tentang perubahan mendasar dalam asumsi tanggung jawab negara untuk memberikan keamanan dan pengembangan kepada penduduk favela (Freeman, 2012).

Pembunuhan yang disengaja mulai marak kembali di Rio pada tahun 2017, dan beberapa petugas UPP telah dituduh melakukan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan konfrontasi terpanjang dan paling keras antara kelompok penjahat dengan polisi sejak sebelum dimulainya operasi UPP. Peperangan itu sampai mengharuskan pemerintah menurunkan banyak prajurit dan beberapa pasukan khusus untuk membantu UPP di favela-favela (Benites, 2017). Peperangan itu mengakibatkan pejabat pemerintah di tingkat negara bagian, masyarakat sipil dan akademisi, tidak lagi menganggap pengamanan sebagai elemen yang relevan saat ini. Meskipun program ini masih ada, penekanan kebijakan diantara perwakilan pemerintah telah secara tegas menjauh dari peningkatan tata pemerintahan dan layanan di favela. Pemerintah menekan dan meminta kebijakan tentang perlunya untuk meningkatkan koordinasi antara pasukan polisi, pemulihan keuangan negara bagian Rio, dan perlunya meningkatkan pelatihan dan peralatan kepolisian (Soares R. , 2017).

Banyak anggota polisi dan terutama mereka yang masuk sebagai milisi, telah dikaitkan tidak hanya dengan pemerasan, tetapi juga dengan pembunuhan. 16% merupakan presentase dari pembunuhan oleh polisi yang bertugas, hal itu

terdaftar sejak pengamanan mulai terjadi di tangan polisi (Amnesty International, 2015). Polisi di Rio adalah polisi yang paling tidak di percaya dan para polisi yang korupsi, 7,2% dari 8.500 lebih orang yang disurvei di seluruh bagian Rio mengklaim bahwa mereka telah diperas oleh polisi. Angka ini merupakan 30% dari semua korban pemerasan secara nasional (Questionario Senansp, 2013). Moral polisi yang dianggap rendah ditambah dengan upah yang kecil, menciptakan keluhan tentang pelecehan dan praktik korupsi di kepolisian UPP meningkat, dan mengakibatkan sekitar 59 polisi militer di Rio ditangkap karena menjalankan kerjasama dengan geng narkoba pada Desember 2012 (Soares R. , 2012).

Pengamanan secara teoritis yang dilakukan UPP bertujuan untuk membangun tatanan sosial bersama dengan hukum yang ada di favela. Pengamanan di Rio de Janeiro didasarkan pada kampanye militer yang bertujuan untuk penataan sosial melalui proyek-proyek urbanisasi yang berhubungan dengan mega-acara (Neocleous, 2013). Penambahan dalam bahasa “perang melawan narkoba”, “keamanan publik”, “integrasi”, dan “pembangunan ekonomi” disampaikan melalui kampanye media yang meyakinkan bahwa itu sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan favela. Tetapi pada kenyataannya hal itu hanya berfokus kepada pengamanan dukungan publik untuk tindakan militer yang memperkuat ekspansi ekonomi (Velooso, 2010).

2.2.1. Kekerasan yang Dilakukan *Pacification Police Units* (UPP)

Pacification Police Units (UPP) merupakan salah satu program keamanan publik yang bertujuan untuk mempertahankan kontrol negara terhadap masyarakat

pemberontak, para pelaku kriminal, singkatnya adalah program untuk mengendalikan dan meningkatkan stabilitas *favela*. *Favela* di negara bagian Rio de Janeiro dan sekitarnya selama bertahun-tahun menjadi fokus utama sebagai alasan dibentuknya UPP, alasan lain karena tingkat kriminalitas yang tinggi akibat dari perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir di wilayah tersebut. UPP dibentuk pada tahun 2008 sebagai pemecah masalah dari kegagalan program sebelumnya (Claudio Frischtak, 2012).

Program UPP merupakan program yang berdasarkan keamanan publik, UPP adalah polisi penenang dalam setiap hal yang melibatkan mereka. Hal ini mendefinisikan dan mempromosikan kemitraan atau kedekatan antara masyarakat dan polisi, dengan tujuan meningkatkan keamanan publik dan mampu melakukan intervensi dalam masyarakat, termasuk dengan kapan diperlukannya kekuatan polisi tersebut. Hal ini secara tidak langsung dilakukan untuk mengubah pandangan terhadap polisi yang kejam, memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melapor menjadikan masyarakat merasa program tersebut memiliki pengaruh dalam kehidupan (Alane C Pfeifer, 2013).

Pacification Police Units (UPP) merupakan inisiatif kebijakan keamanan publik terbaru di kota Rio de Janeiro, tujuan mereka adalah untuk memerangi perdagangan narkoba dan kontrol bersenjata atas wilayah-wilayah tertentu kota dari gerombolan penjahat. UPP pertama didirikan pada 2008 dan semakin berkembang, UPP menggunakan perwira Polisi Militer yang memenuhi syarat, yang secara khusus direkrut untuk bekerja di unit-unit tersebut dan menjalani pelatihan khusus. Saat ini terdapat 9.000 petugas Polisi Militer di UPP, yang merupakan 18% dari

total personel Polisi Militer di negara bagian Rio de Janeiro. Area yang dicakup oleh UPP adalah 196 komunitas, dengan sekitar 600.000 penduduk (Vandenberg, 2015).

Penempatan unit-unit ini telah dikontribusikan untuk mengurangi tingkat kejahatan tertentu di daerah-daerah tertentu di kota, seperti jumlah pembunuhan, termasuk pembunuhan yang disebabkan oleh intervensi polisi dan jumlah polisi yang tewas dalam menjalankan tugas, dan ada sekitar 20 kematian sebagai akibat dari intervensi polisi di daerah-daerah UPP pada tahun 2014. Terlepas dari kemajuan itu, masih ada banyak pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Polisi Militer dari unit-unit tersebut, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan serta eksekusi diluar proses hukum (Amnesty International, 2015).

Unit Polisi Penenang atau UPP muncul sebagai strategi implementasi kebijakan publik untuk menenangkan *favela*, anggota UPP terdiri dari Polisi Militer yang sengaja dibentuk dan melewati pelatihan khusus. Harapan dari pembentukan UPP ini adalah terputusnya sejarah kejahatan dari perusahaan-perusahaan besar, kekuatan militer ini ditandai agar menjadi kekuatan penduduk permanen dan memiliki hubungan dengan komunitas-komunitas sekitar. Mereka merupakan ujung tombak tindakan pemerintah dari upaya-upaya sebelumnya (Graham Denyer Willis, 2014).

Sebelum kehadiran UPP, dalam skenarionya sebagian besar laporan masyarakat mengatakan bahwa terdapat organisasi perdagangan manusia yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kehadiran UPP,

keberadaan perdagangan manusia langsung dilarang dan dihentikan dari masyarakat. Garis besarnya untuk saat ini UPP dibutuhkan dalam masyarakat dalam menangani keamanan dan beberapa hal lainnya, seperti mengadakan program sosial, membantu dalam hal rujukan ke rumah sakit, pembelian obat-obatan, dan pasokan listrik. Hal-hal tersebut yang sebelumnya dikendalikan oleh organisasi perdagangan manusia (Goncalves, 2008)

2.2.2. Kekerasan Bersenjata di Rio de Janeiro

Kepolisian federal yang beroperasi dibawah Kementerian Keamanan Publik merupakan aktor yang memainkan peran kecil dalam penegakan hukum rutin. Sebagian besar pasukan polisi berada dibawah kendali negara, ada dua unit dalam pasukan polisi negara bagian. Polisi sipil, yang bertugas melakukan investigasi peran, dan polisi militer, sebagai pemelihara hukum dan ketertiban (United States Department of State, 2018). Sejarah penjajahan dan kediktatoran militer Brazil merupakan salah satu bentuk dari perampasan, pengucilan dan represi setelah lebih dari dua puluh tahun kediktatoran militer. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa jenis penyebab kekerasan dan kemiskinan Brazil. Akibatnya, banyak masyarakat yang pindah ke kota-kota untuk keluar dari kemiskinan dan menetap di pemukiman informal yang dikenal sebagai *favelas*. Hal ini memperburuk dan mengakibatkan ketidaksetaraan kekayaan yang ada, dan menjadikan kota Rio sebagai kota dengan penduduk miskin terbesar (Lydia Richardson, 2005).

Program UPP mencapai puncaknya pada tahun 2014. Selama semester pertama, ketika Brazil bersiap menyambut pengunjung Piala Dunia, dua unit UPP

diresmikan, dan polisi yang didukung oleh Angkatan bersenjata menyerbu Kompleks Mare berpopulasi 130.000. Penyerbuan tersebut merupakan operasi kekerasan yang menewaskan enam belas orang. Pada Oktober 2016, 846 orang terluka atau terbunuh oleh peluru nyasar akibat aksi tembak-menembak antara UPP dan mafia narkoba (Barbassa, 2017).

Ada beberapa faktor lain yang mendorong lonjakan baru-baru ini dalam kekerasan polisi. Pertama, banyak krisis politik dan ekonomi yang melanda Brazil dan Rio de Janeiro pada khususnya – berkontribusi pada lonjakan kejahatan dan pengurangan signifikansi dalam pengeluaran dalam keamanan publik. Anggaran keamanan publik negara bagian Rio de Janeiro dipotong lebih dari 30% pada tahun 2016. Akibatnya, program inovatif-termasuk intervensi UPP terhenti. Moral polisi telah anjlok, sebagian karena mereka jarang dibayar tepat waktu. Ada serangkaian insiden kekerasan polisi yang mencolok di Rio de Janeiro selama beberapa tahun terakhir, sering direkam dalam video (Muggah, 2016).

Ketika bukti pelanggaran beredar di media sosial, petugas menjadi kurang proaktif di lingkungan tinggi tingkat kekerasannya. Penduduk lokal menjadi kurang berminat untuk melaporkan kejahatan atau meminta bantuan polisi, dan seringkali mengambil keadilan ke tangan mereka sendiri (Muggah, 2016). Ketika otoritas publik mengetahui tentang pembunuhan seseorang sebagai akibat dari intervensi polisi (militer atau sipil), sebuah laporan insiden disusun untuk menggambarkan “pembunuhan yang dihasilkan dari intervensi polisi”, yang juga dapat disebut sebagai “perlawanan yang diikuti oleh kematian”. Dalam situasi ini, orang yang diketahui melakukan pembunuhan dan petugas kepolisian yang bersangkutan

mendaftarkan insiden tersebut dengan otoritas polisi sipil yang kompeten (Nilma Lino Gomes, 2018).

Kasus-kasus “perlawanan yang diikuti oleh kematian” dicatat dalam laporan-laporan insiden administratif yang dibuat oleh polisi sipil, yang membuat klasifikasi pembunuhan oleh petugas polisi berdasarkan pembelaan diri petugas tersebut. Konsep hukum ini berasal dari masa kediktatoran militer (1964-1985), ketika penyiksaan, eksekusi diluar hukum, penghilangan paksa, penyembunyian jenazah, dan pemenjaraan ilegal adalah instrumen dari strategi negara yang dirancang untuk menekan perbedaan politik (Nilma Lino Gomes, 2018).

Program pemolisian komunitas menjadi sangat populer di Amerika Latin selama redemokratisasi antara 1980-1990an, ketika lembaga kepolisian berusaha membangun kembali legitimasi di belakang gagasan tentang polisi yang melayani pemerintah dan mengadopsi gagasan tentang polisi yang melayani warga negara, sebagai lembaga kewarganegaraan (Dammert, 2007). Konsep pemolisian masyarakat dan praktik UPP diperkirakan ada perubahan, karena keberadaan polisi yang terus menerus di *favela* mengubah kemampuan bersosialisasi dan berkontribusi pada pengurangan penembakan (Rodrigues R. , 2014). Ide dasar komunitas terhadap pemolisian adalah bahwa polisi harus bertindak sebelum kejahatan terjadi dan karena itu harus selalu ada di daerah dengan tingkat kekerasan tinggi (Riccio, 2013).

2.3. *Justica Global* Organisasi Hak Asasi Manusia dan Penguatan Masyarakat

Sipil di Rio de Janeiro

Justica Global merupakan organisasi hak asasi manusia non-pemerintah yang bekerja dalam perlindungan, promosi hak asasi manusia, penguatan dan demokrasi. *Justica Global* didirikan pada November 1999, dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran HAM. *Justica Global* berfokus kepada proses perumusan kebijakan publik, berdasarkan pada hak-hak dasar, gender dan kesetaraan ras untuk mendorong penguatan institusi demokrasi dan menuntut jaminan hak bagi korban pelanggaran dan pembela HAM. *Justica Global* diorganisasikan ke dalam empat program tematik dan area administrasi, membentuk tim multidisiplin yang melakukan kegiatan dan mengartikulasikan strategi penelitian dan dokumentasi, litigasi, advokasi, komunikasi, juga pelatihan. Memajukan perlindungan dan promosi perjuangan HAM telah menjadi salah satu misi terpenting *Justica Global* (*Justica Global*, 2020).

Secara historis di Brazil, hak asasi manusia biasanya dikaitkan dengan perjuangan untuk amnesti pada akhir 1970-an, saat disebut sebagai pembukaan demokratis negara. Pada saat itu, penegasan dan penaklukan hak-hak sipil dan politik dialami, dimakzulkan oleh kediktatoran sipil-militer. Saat kediktatoran di Brazil (1964-1985), hak asasi manusia dan pembela tidak terbatas pada bidang tindakan hak-hak sipil dan politik. Mulai tahun 1980-an proses-proses lain dari perjuangan untuk penaklukan, pengakuan dan penegakan jaminan hukum. Dalam konsep *Justica Global* saat ini, para pembela hak asasi manusia dianggap sepenuhnya, baik individu, kelompok, organisasi, masyarakat dan gerakan sosial yang bekerja dalam perjuangan untuk menghilangkan semua pelanggaran hak-hak dasar, kebebasan masyarakat dan individu (*Justica Global*, 2020).

Justica Global bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia non-pemerintah dan penguatan masyarakat sipil. Berfokus kepada proses perumusan kebijakan publik berdasarkan pada hak-hak dasar, gender, dan kesetaraan ras. *Justica Global* diorganisasikan ke dalam empat program tematik dan area administrasi, membentuk tim multidisiplin yang melakukan kegiatannya lalu mengartikulasikan strategi penelitian dan dokumentasi, litigasi, advokasi, komunikasi dan pelatihan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti akan menganalisis beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kota Rio de Janeiro dan ditangani oleh *Justica Global* (Justica Global, 2020).

Justica Global bekerja hampir secara eksklusif untuk mempromosikan hak-hak politik dan sipil, juga merupakan contoh yang bagus dari sebuah NGOs advokasi atau pencari fakta. NGOs atau LSM Hak Asasi Manusia memainkan peran penting dalam menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Kekuatan-kekuatan ini menciptakan harapan bagi banyak orang yang memiliki hak tetapi dilanggar, organisasi-organisasi ini mencari kebutuhan masyarakat dan mencoba untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini akan mengarah kepada analisis bahwa NGOs sangat dipengaruhi oleh negara dan INGOs, meskipun demikian banyak NGOs yang bekerja sesuai dengan norma-norma dan menemukan solusi kreatif untuk suatu permasalahan (Daun, 2005).

Justica Global (JG) adalah pemohon beberapa masalah sebelum sistem Inter-Amerika, dan telah mendaftarkan lebih dari 100 pengaduan ke mekanisme pertama Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika melawan Brazil, disahkan pada Juni 2002, merujuk pada petisi yang diisi oleh *Justica Global*. JG mendukung

peningkatan penggunaan mekanisme internasional melalui kursus intensif, pelatihan di tempat dan aksi bersama di tingkat internasional, dengan mitra local, LSM Brazil, dan dengan gerakan sosial. JG berupaya membantu dan melatih organisasi HAM Brazil setempat untuk mendapatkan akses ke badan-badan HAM internasional. Mendorong kesadaran dan dukungan internasional untuk organisasi hak-hak Brazil dan gerakan sosial, seperti menjamin keselamatan korban dalam kasus-kasus pelanggaran individual di hadapan badan internasional (Justica Global, 2009).

Justica Global (JG) yang dimaksud sebagai suatu organisasi atau jaringan dalam penelitian ini, harus memiliki strategi dalam berkampanye untuk mengembangkan ikatan dan perannya dalam mencapai tujuan. Strategi TANs, yang di mana itu adalah politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, merupakan dasar bagi *Justica Global* (JG) untuk mengembangkan peran dalam mencapai tujuannya (Margaret E. Keck, *Activists Beyond Borders*, 1998).

Justica Global (JG) memiliki beberapa program, yaitu:

- 1) DHESCA (*Direitos Humanos, Economicos, Sociais, Culturais e Ambientais*).
- 2) VISP (*Violencia Institucional e Seguranca Publica*).
- 3) DEFENSORES (*Defensores de Direitos Humanos*).

DHESCA, VISP, dan DEFENSORES merupakan program yang dibentuk oleh *Justica Global*. Program tersebut dikategorikan menjadi tiga bagian berbeda.

Setiap kategori memiliki fokus yang berbeda dalam permasalahan atau kasus yang diangkat. Ketiga kategori tersebut memiliki platform masing-masing dalam *website* JG itu sendiri, berdasarkan platform yang dibentuk oleh JG pada *website* mereka, program ini dibuat untuk mengkategorikan kasus atau permasalahan yang akan diangkat dan diterbitkan dalam berita (Justica Global, 1999).

Kasus atau permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan masuk ke dalam kategori DHESCA. Contoh kasus yang masuk ke dalam kategori DHESCA adalah; perampasan tanah untuk kepentingan ekonomi nasional seperti pertambangan dan pembangkit listrik, ketimpangan kebijakan terhadap kelompok masyarakat asli, konflik hak asasi manusia di wilayah Amazon dan pembabatan hutan yang dilakukan oleh pasukan milisi pedesaan pada saat pengambil alihan lahan adat di Brazil. *Justica Global* berpendapat bahwa pada saat ini kebijakan pemerintah Brazil pada saat ini kurang tegas dan penting untuk mengkorelasikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan budaya masyarakat asli (Justica Global, 1999).

Kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan Kekerasan Institusional atau Kelembagaan masuk ke dalam kategori VISP. Contoh kasus yang masuk ke dalam kategori VISP antara lain adalah; Kekerasan dalam sistem penjara yang ada, kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada komunitas masyarakat untuk mengatur ketertiban, keterlibatan militer dalam beberapa tindakan represif, eksekusi tanpa pengadilan, dan kekerasan yang terjadi di institusi keamanan Brazil lainnya. *Justica Global* menganggap bahwa pendataan kasus pelanggaran

kekerasan yang dilakukan oleh negara harus dilakukan dan dilaporkan (Justica Global, 1999).

Kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan Pembela Hak Asasi Manusia masuk ke dalam kategori DEFENSORES. Dalam DEFENSORES contoh kasus yang telah dilakukan oleh *Justica Global* antara lain adalah; Penanganan kriminalisasi yang dilakukan terhadap pembela hak asasi manusia, ancaman dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, dan laporan mengenai catatan hak asasi manusia di Brazil. *Justica Global* beranggapan pada saat ini ancaman terhadap pejuang HAM di Brazil masih banyak baik secara struktural dan aktual.

Menurut *Justica Global* seluruh *Platform* ini dibentuk untuk mempermudah suatu berita yang dibuat dalam mengkategorikannya, dan pada saat berita-berita tersebut diterbitkan berdasarkan kategori di masing-masing *platform*, masyarakat atau siapapun yang membaca berita tersebut sudah mengetahui dasar dari kasus atau permasalahan itu sendiri. Pendataan secara administratif juga dianggap sangat membantu organisasi tersebut dalam menjalankan strategi menangani permasalahan HAM dengan bantuan masyarakat umum. (Justica Global, 1999).

Strategi yang dilakukan oleh JG dibagi menjadi lima strategi tindakan terpadu dan semuanya diartikulasikan untuk memaksimalkan usaha yang dilakukan, pengaruh posisi, serta isi tuntutan kasus. Adapun strateginya ialah sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan Dokumentasi (Pemantauan kasus, pengumpulan informasi dan pembuatan laporan secara sistematis). Pembuatan laporan

tematik atau regional, pengumpulan informasi yang sistematis, pemantauan kasus-kasus emblematic, melaksanakan misi ditempat (penelitian lapangan dan wawancara langsung dengan korban pelanggaran HAM).

- 2) Litigasi (Kinerja dalam sistem HAM antar-Amerika dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan dalam sistem perlindungan Hak Asasi Manusia PBB). Pengajuan dan tindak lanjut petisi serta permintaan untuk tindakan pencegahan kepada OAS *Inter-American Commission on Human Rights*, kinerja dalam mendengarkan pendapat dari Komisi dan Pengadilan *Inter-American*, mengirim dan memantau laporan secara sistematis untuk prosedur khusus PBB, memberi pendapat kepada pelapor khusus tentang kunjungan ke Brazil, dan partisipasi di Dewan Hak Asasi Manusia dan komite tematik.
- 3) Komunikasi (produksi teks dan konten audiovisual) mengancam pelanggaran dan tema yang berkontribusi pada promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia Produksi teks, foto, bahan grafik, kampanye dan video tentang HAM, kontak langsung dengan jurnalis untuk menyarankan pedoman dan memberikan informasi, produksi bahan institusional, umpan situs web dan media sosial, dan dukungan untuk komunikasi gerakan sosial dan jaringan.
- 4) Formasi (organisasi seminar, debat, lokakarya, dan kursus) melakukan seminar, lokakarya tentang akses ke mekanisme HAM internasional dan strategi perlindungan bagi para pembela HAM, produksi materi yang

mengungkapkan hak-hak masyarakat dan kelompok yang terkena dampak.

Advokasi (artikulasi politik, partisipasi dalam jaringan dan pemantauan kebijakan publik tentang HAM). Kegiatan advokasi untuk pembangunan dan pemantauan kebijakan publik dan untuk penguatan infrastruktur pemerintah (program, komisi, rencana aksi, anggaran). Artikulasi politik dengan organisasi lokal, nasional, regional dan internasional. Partisipasi dalam jaringan, melakukan tindakan dan kampanye yang mendesak. Artikulasi nasional dan regional tentang HAM, pemantauan tindakan pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudisial) (Justica Global, 1999).



BAB III

Upaya *Justica Global* Menggunakan Konsep *Transnational Advocacy*

Networks

Strategi Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) dalam analisisnya perlu dilakukan penekanan berupa peran politik organisasi-organisasi, terutama bentuk dan isi dari kampanye organisasi tsb. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, kampanye adalah kegiatan terkait strategi di mana anggota sebuah jaringan mengembangkan ikatan dan peran dalam mengejar tujuan bersama.

3.1. Analisis *Justica Global* melalui Konsep Politik Informasi

Politik informasi merupakan hal mendasar dalam suatu kampanye. Keck dan Sikkink berpendapat kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan efektif adalah “mata uang yang paling berharga”. Artinya, dalam hal ini *Justica Global* atau JG diharuskan dapat memanfaatkan organisasi-organisasi lain sebagai pemegang peran internasional yang sah. Politik informasi diharapkan untuk bertindak dalam dua bidang, mereka harus dapat diandalkan dan menarik perhatian. Maka dari itu, hal ini digunakan dalam konteks yang tepat waktu untuk meyakinkan publik dan pembuat kebijakan untuk bertindak, menggunakan fakta untuk memberi informasi dan komentar untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Dalam pengertiannya, *framing* adalah komponen penting sebagai peluang di mana kondisi yang paling kondusif dimanfaatkan untuk isu-isu yang digunakan ketika berkampanye (Margaret E. Keck, *Activists Beyond Borders*, 1998).

Dalam strategi JG, politik informasi masuk ke dalam strategi Penelitian dan Dokumentasi atau Litigasi. Hal ini merupakan pembuatan laporan tematik atau regional, pengumpulan informasi yang sistematis, pemantauan kasus-kasus, melaksanakan misi di tempat, penelitian lapangan, dan wawancara langsung dengan korban pelanggaran HAM, ditambah lagi dengan kinerja dalam sistem HAM dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), juga dalam sistem perlindungan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Justica Global, 2020).

Melihat kasus ini, JG melakukan kecaman terhadap eksekusi kota-kota kumuh di Rio yang menerapkan konsep TANs. Politik informasi sebagai langkah pertama dalam strategi TANs yang dilakukan JG adalah pembuatan berita mengenai peningkatan kematian yang dilakukan oleh polisi negara bagian Rio de Janeiro. JG mengirim laporan kepada PBB untuk ringkasan eksekusi sewenang-wenang atau ekstra-yudisial, di mana JG mengancam beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Brazil (Fichinho, 2016). Dalam persiapan Piala Dunia 2014, pelanggaran HAM terus terjadi oleh pihak keamanan di Brazil. Sejak 2013, pasukan polisi di Brazil membubarkan sebagian besar aksi damai secara paksa, termasuk penyalahgunaan senjata yang mengakibatkan ratusan orang terluka dan ditahan tanpa melalui proses pengadilan, termasuk jurnalis dan aktivis media (Amnesty Internasional, 2016).

Justica Global dalam hal ini terus meneliti di bidang kekerasan institusional dan keamanan publik untuk keadilan global, pemantauan ini dilakukan untuk membahas tentang masa depan UPP yang dinilai melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di berbagai penjuru Rio de Janeiro. *Justica Global* terus menggunakan

skenario politik, dengan melalui penerbitan ulang wacana moralisasi dan peradaban dengan tindakan pemerintah yang menerapkan disiplin dan kontrol populasi wilayah melalui penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam militerisasi. Negara sedang memperbarui teknologinya untuk mengendalikan populasi kulit hitam, miskin dan kumuh, serta proyek UPP dapat dipahami sebagai salah satu dari pembaruan ini (Mario, 2014).

Mengenai adanya baku tembak antara polisi dan masyarakat dan digunakan sebagai aspek positif dari UPP, penolakan terhadap pendekatan agresif dan keras oleh agen-agen polisi militer sering terjadi dalam konteks kekerasan ini. Cara ini hadir di favela sejak awal adanya UPP secara tidak langsung membentuk kerangka kerja penindasan, dan mengakibatkan berlanjutnya proses demonstrasi kriminalisasi yang sudah lama. Banyak penduduk yang dijebak dengan alasan “penghinaan terhadap otoritas” atau “kejahatan ketidaktaatan” yang menghasilkan peningkatan jumlah penangkapan sewenang-wenang dengan ancaman hukuman penjara. Hal ini telah dilaporkan oleh *Justica Global Group* dan Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, JG juga melaporkan kasus-kasus penganiayaan oleh agen-agen UPP. Penduduk yang menjadi korban penindasan melaporkan hal itu kepada media komunitas dan disiarkan baik melalui radio maupun surat kabar, juga dengan melakukan aksi gerakan sosial dari Favela dengan aktivitas yang terkonsolidasi di bidang pertahanan. *Justica Global* juga meminta perhatian terhadap beberapa perubahan signifikan dalam skenario kontrol dan penindasan ini sejak 2013, JG juga menekankan bahwa tindakan represif tersebut

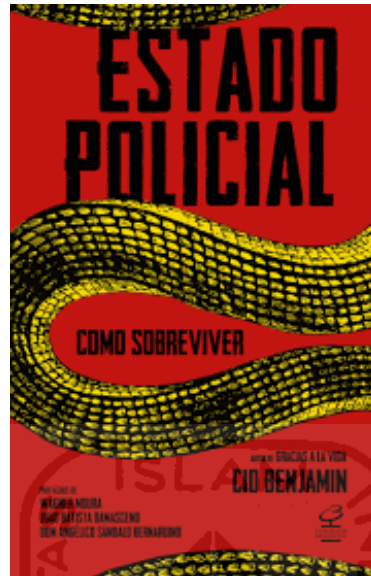
telah ditandai oleh aktivitas UPP yang bukan bagian dari komposisi tugas asli militer (Mario, 2014).

3.2. Analisis *Justica Global* melalui Politik Simbolik

Jenis strategi kedua menurut Keck dan Sikkink adalah politik simbolik, jenis strategi ini muncul ketika peristiwa-peristiwa penting terjadi dan dibingkai sebagai simbol dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak hanya mengembangkan kesadaran audiensi, tetapi juga memperluas dasar-dasar advokasi jaringan. Karena itu, para aktivis menggunakan simbol, aksi atau cerita untuk memahami masalah dan memfasilitasi informasi menggunakan analogi (Blitt, 2004). Dalam hal ini JG biasanya menggunakan gambar-gambar yang dramatis dalam beritanya, dengan tujuan agar organisasi dan masyarakat lain baik nasional maupun internasional memiliki rasa kepedulian akan isu yang diangkat (Margaret E. Keck, *Activists Beyond Borders*, 1998).

Strategi politik simbolik ini, atau dalam strategi JG sendiri adalah strategi Komunikasi. Strategi Komunikasi ini merupakan produksi teks, foto, bahan grafik, kampanye dan video tentang hak asasi manusia. Melakukan kontak langsung dengan jurnalis untuk menyarankan pedoman dan memberikan informasi, produksi bahan institusional, umpan situs web dan media sosial, dan dukungan untuk komunitas gerakan sosial jaringan. Artinya, JG menggunakan produksi teks dan konten audiovisual, dalam mengancam pelanggaran dan mengangkat tema yang berkontribusi pada promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Justica Global, 2020).

Dalam hal ini berita atau informasi yang disampaikan menggunakan bentuk gambar atau *video* yang dapat dirasakan. Artinya, konten biasanya dibentuk dengan berupa pengambilan gambar atau *video* pada saat suatu kejadian pelanggaran HAM terjadi, atau dengan mengilustrasikannya. desakan untuk mendemiliterisasi (*Demilitarize*), tidak hanya polisi tetapi juga masyarakat itu sendiri, adalah fokus dari seri video *Justica Global* yang diunggah di media *Youtube* dengan judul “*O Estado Policial*”. Gambar-gambar dan kesaksian dalam video tersebut dikumpulkan di Sao Paulo, Salvador dan Rio de Janeiro, dari 2013 hingga 2015. Melalui kerangka waktu inilah *Justica Global* berupaya menunjukkan bahwa pertumbuhan terus-menerus dilalui bersamaan dengan penindasan, kematian, dan pemenjaraan yang tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut lebih mengungkap implementasi proyek negara yang secara langsung mempengaruhi penduduk kulit hitam dan miskin, melalui hal tersebut menunjukkan bahwa pikiran dan tubuh mereka hidup dalam budaya ketakutan untuk kemajuan militerisasi yang merupakan hasil dari kekerasan perkotaan (*Global, Desmilitarize - O Estado Policial, 2017*).



Gambar 1. Poster Film Estado Polical
Salah Seri Demilitarie Justicia Global
di Youtube.

(Sumber: <https://www.livrofacil.net/estado-policial-como-sobreviver-9788520013960/p>)

Video pertama yang diterbitkan oleh *Justica Global* dalam seri “*Desmilitarize*”, JG memperlihatkan bagaimana keadaan penduduk di Favela, JG mendokumentasikan kependudukan pertama dari kompleks Favela Mare, dan bagaimana pemolisian masyarakat di Bahia, juga kinerja UPP yang dapat dikatakan berspesialisasi dalam kematian seperti di Rota, Sao Paulo. *Justica Global* lalu menerbitkan video dokumenternya yang kedua dari seri “*Desmilitarize*” dengan judul “*Racismo e Estado*”, JG memahami bagaimana struktur negara ditempa atas eksploitasi dan kematian populasi kulit hitam. Tidak hanya polisi, tetapi juga penuntutan dari seluruh sistem peradilan pidana yang beroperasi dalam logika dimana orang kulit hitam tidak dijamin atas kepemilikan hak-hak mereka. Contoh

kasus-kasus yang salah satunya dialami oleh seorang penduduk yang bernama Claudia Silva Ferreira, yang tubuhnya diseret oleh kendaraan Polisi Militer berkilo-kilo meter jauhnya di jalan utama Rio de Janeiro, dan korban kekerasan institusional lainnya juga diingat dalam pesan yang bergema selama berabad-abad atas penindasan dan rasisme (Global, Desmilitarize Racismo E Estado, 2017).

3.3. Analisis *Justica Global* melalui Politik Pengaruh

Jenis ketiga adalah politik pengaruh atau *leverage politics*, ketika jaringan mendorong aktor yang lebih kuat untuk merubah kebijakan atau posisi mereka. *Leverage politics* terjadi biasanya antara aktivis dan pemerintah, lembaga keuangan atau aktor swasta lainnya. Agar efektif, NGOs atau disini adalah JG, perlu meningkatkan status mereka melalui politik informasi dan politik simbolik terlebih dahulu, karena organisasi atau aktor yang lebih menonjol lebih mungkin untuk berhasil dilobi dalam mencapai perubahan politik. Legitimasi mereka pun tergantung pada reputasi mereka sebagai penyedia keahlian yang objektif dan informasi yang dapat diandalkan.

Kerjasama *Justica Global*, *Amnesty International*, Jaringan Komunitas dan Gerakan Menentang Kekerasan, dan Pusat Pertahanan Hak Asasi Manusia di Petropolis, menjadi salah satu contoh dalam konsep ini. Melalui politik pengaruh *Justica Global* juga mendapatkan bantuan dari *Amnesty International* dalam melakukan lobi ke pemerintah dalam pembuatan beberapa kebijakan dalam mereduksi kekerasan terhadap HAM, terutama terkait permasalahan yang dilakukan oleh UPP (Lindert & Troost , 2014).

Kerjasama lain yang dilakukan oleh *Justica Global* dalam memulai kampanye internasional menentang penggunaan kekerasan oleh polisi Rio de Janeiro menggunakan kendaraan lapis baja seperti *caveirao* di komunitas miskin kota. Kampanye ini akan diluncurkan secara bersamaan di Rio de Janeiro dan London, presentasi resmi kampanye di Rio akan berlangsung pada pukul 11 pagi di markas Dewan Regional untuk Pekerjaan Sosial di Rua Mexico. Pada pukul 3 sore, berbagai organisasi berkumpul di depan Balai Kota Rio de Janeiro di Cinelandia untuk mengumpulkan tanda tangan para penduduk korban penggunaan kendaraan lapis baja *caveiro* oleh polisi Rio de Janeiro. Dalam operasi yang dilakukan menggunakan kendaraan lapis baja *caveiro* lainnya, polisi membuat ancaman psikologis dan fisik kepada penduduk untuk mengintimidasi masyarakat secara keseluruhan (Justica Global, 2006).

Polisi memiliki hak yang sah untuk melindungi diri mereka saat bertugas, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang dilayaninya. Pemolisian yang agresif telah mengakibatkan penderitaan besar bagi komunitas miskin Rio, serta hilangnya kepercayaan mereka pada kemampuan negara untuk mempertahankan dan menjamin keamanan. Untuk organisasi yang mempromosikan kampanye ini, *caveirao* adalah simbol kelemahan dalam kebijakan keamanan publik Rio de Janeiro. Keamanan tidak akan pernah tercapai melalui kekerasan dan intimidasi, kebijakan keamanan publik yang inklusif berdasarkan teknik penelitian dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus diperkenalkan tanpa penundaan (Justica Global, 2006).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dalam pemindahan keluarga dari kawasan Vila Autodromo, telah membuat *Justica Global* meminta PBB untuk memantau situasi penduduk serta proses urbanisasi saat ini yang telah dijanjikan oleh kota Rio de Janeiro. Masyarakat yang terletak di sebelah taman Olimpiade telah menghadapi upaya penghapusan selama beberapa dekade, dengan alasan tempat itulah bagian utama dari penyelenggaraan Olimpiade. Dalam kasus itulah, *Justica Global* meminta agar Pembela Hak Asasi Manusia dan Hak Perumahan bertindak untuk memastikan bahwa warga memiliki hak-hak yang harus mereka hormati, selain menggunakan dua jaringan organisasi tersebut *Justica Global* juga memanfaatkan aktor negara dalam membawa isu ini ke PBB berdasarkan laporan yang mereka buat pada tahun 2015 berdasarkan *comment of recommendation* negara-negara lain. (Justica Global's, 2015)

. Jumlah keluarga yang dipindahkan beserta dengan prosesnya disorot dan dilaporkan melalui dokumen yang dikirim ke PBB, dilaporkan bahwa bagaimana seluruh proses penghapusan tidak dibenarkan, melihat dari hampir 600 keluarga yang ada di wilayah tersebut, hanya lebih dari 20 keluarga yang telah menerima janji urbanisasi dari Balai Kota. Laporan tersebut menyoroti dengan tepat akibat dari ketidakamanan yang dibuat kepada masyarakat dengan berbagai upaya pemindahan yang dilakukan oleh Walikota, seperti salah satunya kasus Maria de Penha Macena yang saat ini tinggal di gereja dan bergantung kepada komunitas setelah rumahnya dihancurkan, Maria de Penha menjadi sasaran agresi oleh penjaga kota pada 2015 (Justica Global, 2016).



Gambar 2. Maria Da Penha Macena Berkampanye Memperjuangkan Hak Perumahan-nya yang Tergusur Akibat Komplek Olimpiade.

(Sumber: <https://www.gettyimages.com/photos/maria-da-penha-macena>)

3.4. Analisis *Justica Global* melalui Politik Akuntabilitas

Jenis strategi yang keempat atau terakhir adalah, politik akuntabilitas yang merupakan pemantauan janji-janji yang dibuat oleh negara. Politik akuntabilitas memungkinkan anggota jaringan advokasi transnasional untuk mengambil keuntungan dari posisi sebelumnya, komitmen yang dibuat oleh negara digunakan sebagai cara mendefinisikan perbedaan wacana mereka dan mempromosikan kewajiban mereka atau memastikan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini mengartikan bahwa aktor pendukung JG, dalam hal ini harus ikut serta dalam pemantauan atau mengupayakan kebijakan yang telah dinyatakan negara apabila tidak sesuai dalam pelaksanaannya (Margaret E. Keck, *Activists Beyond Borders*, 1998).

Keefektifan kampanye tergantung pada isu-isu penting yang diangkat. Misalnya, banyak topik yang tidak dapat mencapai status yang memadai untuk dimanfaatkan oleh jaringan. Hal itu terjadi karena masalah yang dapat dikaitkan dengan tindakan yang disengaja dari individu, dapat diidentifikasi memiliki lebih banyak potensi untuk dipilih dalam kampanye karena penyebab yang sangat struktural dan sulit untuk dijelaskan. Kampanye juga dapat bergantung pada karakteristik aktor (apabila mereka rentan terhadap kendala moral dan material), serta pada seberapa kuat jaringan itu sendiri (Schmitz, 2010).

Sebelas orang yang telah membahayakan hidup mereka dan dikriminalisasi karena membela hak-hak mereka hal ini merupakan bagian dari kampanye pemilihan Linha de Frente sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang akan diluncurkan di Rio de Janeiro di wilayah Pico do Santa Marta. Tujuan *Justica Global* mengenai hak tanah dan pembela garis depan yang juga mempromosikan inisiatif ini, adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran yang ada secara sistematis hak-hak di negara tersebut. Indianara Siquera dan Vitor Lira adalah dua pembela yang lintasan militansinya dilaporkan dalam kampanye, Indianara Siqueira adalah pemimpin kelompok *Transrevolucao*, perwakilan wilayah tenggara di RedTrans Brazil yang berafiliasi dengan RedLac Trans di Amerika Latin dan Karibia, juga sebagai penasihat parlemen untuk wakil federal Jean Wyllys. Mengacu pada gerakan LGBT dan Transfeminis yang berbeda-beda, ia memperjuangkan pertempuran keadilan karena memprotes dengan cara-cara yang tidak lazim sehingga pemerintah Brazil mengakui dan menghormati hak-hak orang transfeminis, mereka juga mengancam bahwa laki-laki dan perempuan tidak

setara dihadapan hukum, karena perempuan lebih dikriminalisasi. Karena aktivitas itu, Indianara telah diancam beberapa kali dan telah mengalami upaya pembunuhan (Dias, 2014).

Vitor Lira yang merupakan penduduk di puncak Santa Marta dan termasuk kedalam daerah kumuh bersejarah di lingkungan Botafogo, wilayah selatan Rio de Janeiro. Daerah tersebut merupakan salah satu kawasan dengan pemandangan paling indah di kota sejak 2006, akan tetapi pemerintah negara bagian telah berusaha untuk menghapusnya. Setelah itu, akibat dari pembentukan UPP pada tahun 2008, militerisasi dan kontrol kehidupan sehari-hari kepada penduduk meningkat tanpa adanya peningkatan kualitas layanan publik yang ditawarkan kepada penduduk, seperti yang dijanjikan. Penempatan UPP di wilayah tersebut juga mengakibatkan adanya tindakan represif dari aparat keamanan tersebut. Sebuah kelompok yang dipimpin oleh Vitor di Komite Warga do Santa Marta mengorganisir untuk mempertanyakan niat pemerintah sebenarnya untuk memindahkan mereka dari daerah tersebut. Sejak 2011, serangkaian kegiatan telah dilakukan terhadap pemindahan 150 keluarga untuk urbanisasi tempat itu (Dias, 2014).

Partisipasi Indianara Siqueira dan Vitor Lira dengan cara meluncurkan kampanye di Rio de Janeiro, akan memiliki tema utama hak tubuh seseorang dan hak atas perumahan. Kegiatan itu akan mencakup obrolan dengan pembela Hak Asasi Manusia dan media-media yang akan memamerkan video dan foto tentang perjuangan dan program tersebut. Kampanye itu membahas tentang kasus pembela Hak Asasi Manusia, memulihkan perjuangan politik yang merasuki kehidupan

mereka dan komunitas mereka. Berasal dari berbagai bagian wilayah nasional, mereka memiliki konfrontasi dalam tema yang berbeda, pelanggaran terbaru dengan mengadakan acara besar di negara itu dilaporkan dan dialami oleh Vitor Lira dari Rio de Janeiro, May Debora Silva dari Sao Paulo dengan mengingat kekuatan dan perjuangan para korban korban kekerasan polisi di pinggiran kota-kota Brazil, juga kesulitan dan konfrontasi perjuangan LGBT yang dibesarkan oleh Indianara Siqueira dari Rio de Janeiro dan Marcio Marins dar Parana (Dias, 2014).



Gambar 3. Poster Kampanye Pembela Hak Asasi Manusia yang Digerakan oleh Indianara Siqueira dan Vitor Lira.

(Sumber: <https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-de-defensores-de-direitos-humanos-realiza-acao-em-curitiba/14758>)

3.5 Analisis Implementasi Justica Global berdasarkan *Transnational Advocacy Network*

Berdasarkan buku Margaret E. Keck disebutkan bahwa ada lima kondisi dalam implementasi *Transnational Advocacy Network*, berdasarkan analisis saya yang upaya yang dilakukan oleh *Justica Global* masuk ke dalam kondisi *issue creation and agenda setting*. *Justica Global* berupaya sedari awal dengan mengumpulkan informasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Brazil, lalu melakukan dokumentasi dan kampanye, melalui konten audio visual

mengenai pelanggaran HAM yang ada, lalu menggunakan jaringannya untuk mengangkat isu HAM yang ada di Brazil dan berupaya untuk memberi tahu dunia Internasional (Margaret E. Keck, *Activists Beyond Borders*, 1998).

Isu yang diangkat oleh *Justica Global* telah berhasil masuk ke dalam UNHRC. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNHRC terhadap pemerintah Brazil dan tanggapan negara-negara lain terhadap implementasi kebijakan itu, negara yang memberikan tanggapan yaitu, Korea Selatan, Spanyol, Denmark, Serbia dan beberapa negara lainnya (Justica Global's, 2015).



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Brazil merupakan salah satu negara terbesar yang ada di Amerika Latin, negara tersebut beberapa kali ditunjuk sebagai tuan rumah *Mega events* pada beberapa tahun kebelakang ini. Brazil melakukan upaya untuk memberantas kejahatan yang ada demi acara-acara besar tersebut, sebagai salah satu negara yang besar di Amerika Latin tingkat kriminalitas sangatlah tinggi, hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kemiskinan negara tersebut. Tingkat pembunuhan di Brazil merupakan salah satu paling kejam di dunia, kelompok kejahatan terorganisir menjadi salah satu aktor penting dalam kriminalitas yang ada, letak geografis negara itu yang strategis menjadikan tempat transit istimewa narkoba dan obat-obatan terlarang dari Amerika Selatan bahkan hingga Afrika dan Eropa.

Narkoba sebagai salah satu penyebab kriminalitas di Brazil membuat pemerintah negara tersebut melakukan kebijakan *war on drugs* dalam mengatasi perdagangan narkoba melalui metafora perang, hal ini menyebabkan pihak kepolisian di negara itu mendapat banyak kritikan karena kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan yang sewenang-wenang. Analisa saya melihat peran NGOs *Justicia Global* dalam membantu masyarakat Brazil mengadvokasi masyarakat dalam menegakkan pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sana, sebagai lembaga pencari fakta organisasi ini memainkan peran penting dalam membantu mengumpulkan data-data serta sebagai harapan bagi masyarakat Brazil dalam melawan tindakan pelanggaran HAM.

Rio de Janeiro sebagai salah satu kota terbesar di Brazil memiliki ketimpangan masyarakatnya sangat mencolok, hal ini dapat dilihat dengan hampir setengah populasi di kota itu berada di tingkat ekonomi rendah sehingga mengakibatkan sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Brazil. Angka penduduk miskin yang tinggi mengakibatkan tingginya angka kriminalitas kota tersebut. Pemerintah Brazil dalam menyelenggarakan *mega events* mengeluarkan konstitusi UPP yaitu petugas keamanan yang ditugaskan mengamankan kota dan mengurangi angka kejahatan. Di balik suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia dan Olimpiade Brazil, pemerintah negara tersebut melakukan pengusuran untuk membangun *real estate* dan kompleks olahraga sehingga mengakibatkan bentrokan antar polisi dan warga. Rio de Janeiro dalam mengatasi permasalahan narkoba menurunkan aparat keamanan tambahan seperti polisi dan militer namun tingkat kepercayaan warga masih rendah, karena banyak dari mereka yang beranggapan ini bersifat politis.

Program UPP yang dijalankan telah menempuh jalan panjang untuk mencapai tujuannya meningkatkan keamanan di favela. Namun masyarakat melaporkan bahwa tingkat kriminalitas masih ada dan malah meningkatkan tensi antara masyarakat dengan kepolisian, karena adanya anggapan program ini pengekan masyarakat selama acara berlangsung. Banyak anggota UPP yang dianggap melakukan kekerasan dan pemerasan terhadap masyarakat favela, alih-alih meningkatkan keamanan demi masyarakat namun UPP hanya mementingkan pengamanan publik untuk tindakan militer yang memperkuat ekspansi ekonomi. Posisi UPP dalam memberantas kejahatan sudah terlaksanakan beberapa namun

angka kekerasan masih ada di *favelas* yang disebabkan oleh program itu cukuplah besar, kurangnya proaktif petugas dalam pengamanan wilayah juga menambah stigma negatif program tersebut tersebut.

Justica Global merupakan salah satu NGOs yang terlibat dalam membantu masyarakat Brazil dalam menghadapi kekerasan yang telah dilakukan oleh aparat keamanan negara itu, memajukan perlindungan dan promosi HAM menjadi salah satu misi penting organisasi tersebut. *Justica Global* membantu beberapa organisasi HAM Brazil untuk membangun relasi yang cukup kuat dengan dunia luar dalam mendorong dunia internasional untuk mendukung hak-hak sipil masyarakat negara itu dalam menjamin keselamatan korban dalam kasus-kasus pelanggaran individu di hadapan internasional.

Analisa saya melihat upaya *Justica Global* menggunakan strategi Jaringan Advokasi Transnasional (TAN), pada konsep tersebut disebutkan bahwa peran politik organisasi dalam kampanye mereka. Pada konsep TAN menggunakan empat cara dalam strategi Jaringan Advokasi Transnasional yaitu; politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh dan akuntabilitas. *Justica Global* dalam melaksanakan tugasnya membagi tiga program yaitu; DHESCA (Hak Asasi Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan), VISP (Kekerasan Institusional dan Keamanan Publik), dan DEFENSORES (Pembela Hak Asasi Manusia). *Justica Global* dalam melaksanakan kampanye mereka menggunakan lima strategi yaitu: Penelitian dan Dokumentasi, Litigasi, Komunikasi, Formasi dan Advokasi.

Pada analisa saya menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional, dalam proses politik informasi *Justica Global* telah melaksanakan pembuatan berita mengenai kekerasan kepolisian kepada masyarakat. Pada saat melihat strategi *Justica Global* melalui politik simbolis dengan memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat dengan kampanye menggunakan audiovisual mengancam pelanggaran dan mempromosikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada strategi *leverage politic*, *Justica Global* telah membangun kerja sama dengan organisasi internasional yang berkaitan dengan HAM untuk menekan pemerintah dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan menentang penggunaan kekerasan oleh polisi di Rio de Janeiro. Strategi terakhir yang digunakan oleh *Justica Global* adalah politik akuntabilitas dalam melihat pemenuhan janji pemerintah dalam komitmen yang sebelumnya telah dibuat oleh pemerintah. Melihat keberhasilan strategi jaringan advokasi transnasional berdasarkan *boomerang pattern* yang menjadi dasar konsep ini penulis melihat *Justica Global* memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mereduksi tindakan represif pemerintah dan mendapat perhatian dunia internasional melalui rekomendasi yang ada dari UNHCR dengan mengangkat isu HAM yang ada di Brazil ke dunia internasional.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Dalam kesimpulan di atas, penelitian ini secara spesifik melihat peran *Justica Global* dalam kasus pelanggaran HAM di Rio de Janeiro, dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga sebagai tindak lanjut penelitian

ini, saya sebagai penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, terkait apa saja tentang peran dunia internasional dalam kasus HAM di Brazil. Mengingat bahwa UNHCR memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memberi masukan terhadap Brazil dalam menangani kasus pelanggaran HAM di negara itu.



DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://www.gettyimages.com/photos/maria-da-penha-macena>
- Alane C Pfeifer, M. W. (2013). *Praticias Organizacionais das Unidades de Policia Pacificadora do Rio de Janeiro e sua influencia nas favelas onde atuam*. Sao Paulo: Fundacao Getulio Vargas.
- Aline Fabia Guerra De Moraes, D. C. (2016). *Brazilian Jeitinho and Culture: an Analysis of the Films Elite Squad 1 and 2*. Sao Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Amnesty Internasional. (2016). *A Violencia Nao Faz Parte Desses Jogos! Risco De Violações De Direitos Humanos Nas Olimpíadas Rio 2016*. Rio de Janeiro: Amnesty International.
- Amnesty International. (2015, 08 03). *Brazil: You Killed My Son: Homicides By Military Police In The City Of Rio de Janeiro*. Retrieved from Brazil: You Killed My Son: Homicides By Military Police In The City Of Rio de Janeiro: <https://www.amnesty.org/en/documents/amr19/2068/2015/en/>
- Araujo de Assumpcao, E. L. (2012). *Elementos Para Uma Analise Bioetica das Transformacoes Urbanas*. Revista Bioetica.
- Araujo, M. (2012). Rio em forma olimpica: a construcao social da pasificacao na cidade do Rio de Janeiro. *Conflitos de (grande) interesse: estudos sobre crimes, violencias e outras disputas conflituosas*, 117-130.
- Barbassa, J. (2017). Safety for Whom?: Securing Rio for the Olympics. In A. Zimbalist, *Rio 2016: Olympic Myths, Hard Realities* (pp. 153-178). Brooklyn: Brookings Institution Press.
- Benites, A. (2017, 09 23). *Tiroteios Semeimam Caos e Exercito Tenta Cercar Rocinha*. Retrieved from Tiroteios Semeimam Caos e Exercito Tenta Cercar Rocinha: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/22/actualidad/1506096779_157785.html.
- Blitt, R. C. (2004). Who Will Watch the Watchdogs? Human Rights NonGovernmental Organizations and the Case for Regulation. *Buffalo Human Rights Law Review Vol 10*, 261-398.
- Caldeira, T. P. (2002). The Paradox of Police Violence in Democratic Brazil. *Sage Journals*.

- Cano, I. (2012). *Os Donos Do Morro: Ua Avaliacao Exploratoria Do Impacto Das Unidades De Policia Pacificadora (UPP) No Rio de Janeiro*. Corporacao Andina De Fomento.
- Claudio Frischtak, B. R. (2012). *Crime, House Prices, and Inequality: The Effect of UPP in Rio*. New York: Federal Reserve Bank of New York Staff Reports.
- Cornelissen, S. (2011). *Mega Event Securitisation in a Third World Setting*. Urban Studies.
- Dammert, L. (2007). *Dilemas de la reforma policial en America Latina*. Rio de Janeiro.
- Daun, J. (2005). *Globalization, The Meaning of Human Rights and The Role of Human Rights NGOs*. Knoxville: College Scholars.
- Davis, L. K. (2011). International Events and Mass Evictions: A Longer View. *International Journal of Urban and Region Research*, 582-599.
- Dias, A. (2014, 06 25). *Ato da Campanha Linha de Frente no Pico do Santa Marta, no Rio*. Retrieved from Ato da Campanha Linha de Frente no Pico do Santa Marta, no Rio: <http://www.global.org.br/blog/ato-da-campanha-linha-de-frente-no-pico-do-santa-marta-no-rio/>
- Elaine H, J. W. (2016). *The 2016 Olympics Games; Health, Security, Environmental, and Doping Issues*. Rio de Janeiro: Congressional Research Service.
- Fichinho, D. (2016, August 10). *Justica Global*. Retrieved from Justica Global denuncia a ONU execucoes em favelas do Rio para realizacao da Olimpiada: <http://www.global.org.br/blog/justica-global-denuncia-onu-execucoes-em-favelas-do-rio-de-janeiro-para-realizacao-das-olimpiadas/>
- Fiori, R. R. (2000). *Urban Poverty Alleviation through Environmental upgrading in Rio de Janeiro*. London: Development Planning Unit University College London.
- Folha de Sao Paulo. (2014, 03 09). *State Can't Afford to Ignore Rise of Rio Militias*. Retrieved from State Can't Afford to Ignore Rise of Rio Militias: <https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/opinion/2014/09/1510117-editorial-state-cant-afford-to-ignore-rise-of-rio-militias.shtml>
- Freeman. (2012). *Neoliberal Accumulation Strategies and the visible hand of police pacification in Rio de Janeiro*. Sorocaba.
- Global, J. (Director). (2017). *Desmilitarize - O Estado Policial* [Motion Picture].
- Global, J. (Director). (2017). *Desmilitarize Racismo E Estado* [Motion Picture].

- Goncalves Soares, R. (2006). A Politicia, o direito e as favelas do Rio de Janeiro: Um breve olhar historico. *Journal des Anthropologues*, 104-105.
- Goncalves, K. P. (2008). O Efeito UPP (Unidade de Policia Pacificadora do Rio de Janeiro) Nas Representacoes Sociais de Violencia e de favela. *O Efeito UPP (Unidade de Policia Pacificadora do Rio de Janeiro)*, 181-197.
- Gradin, C. (2007). *Why Is Poverty So High Among Afro-Brazil? A Decomposition Analysis of the Racial Poverty Gap*. Galicia: IZA.
- Graham Denyer Willis, M. M. (2014). Process and Pattern in Institutional Reforms: A Case Study of the Police Pacifying Units (UPP) in Brazil. *World Development*, 232-242.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 68-69.
- Herran, C. (2015). *Reducing Poverty and Inequality in Brazil*. Inter-American Development Bank.
- Justica Global. (1999, 11). *Conheca Nossos Programas*. Retrieved from Conheca Nossos Programas: <http://www.global.org.br/>
- Justica Global. (1999, 11). *Estrategias*. Retrieved from Estrategias: <http://www.global.org.br/sobre-nos-quem-somos/estrategias/>
- Justica Global. (2006, 03 10). *Organizacoes iniciam campanha internacional contra o uso do caveirao nas favelas do Rio de Janeiro*. Retrieved from Organizacoes iniciam campanha internacional contra o uso do caveirao nas favelas do Rio de Janeiro: <http://www.global.org.br/blog/organizacoes-iniciam-campanha-internacional-contra-o-uso-do-caveirao-nas-favelas-do-rio-de-janeiro/>
- Justica Global. (2009, May 15). *Justica Global*. Retrieved from ESCR-Net: <https://www.escr-net.org/member/justica-global>
- Justica Global. (2016, 04 14). *Justica Global pede que ONU acompanhe processo de urbanizacao da Vila Autodromo*. Retrieved from Justica Global pede que ONU acompanhe processo de urbanizacao da Vila Autodromo: <http://www.global.org.br/blog/justica-global-pede-que-onu-acompanhe-processo-de-urbanizacao-da-vila-autodromo/>
- Justica Global. (2020, March 3). *Justica Global*. Retrieved from Justica Global: <http://www.global.org.br/en/sobre-nos/quem-somos/>
- Justica Global. (2020, May 29). *Justica Global*. Retrieved from Defensores de Direitos Humanos: <http://www.global.org.br/defensores/atuacao/>
- Justica Global. (2020, March 5). *Justica Global*. Retrieved from Justica Global: <http://www.global.org.br/sobre-nos-quem-somos/quem-somos/>

- Justica Global. (2020, March 7). *Justica Global*. Retrieved from Estrategias Justica Global: <http://www.global.org.br/sobre-nos-quem-somos/estrategias/>
- Justica Global's. (2015). *Justiça Global's comments on the recommendations of the Report of the Working*. Justica Global's.
- Khotari, C. (2004). *Research Methodology*. Jaipur: New Age International Publisher.
- Koonings K, K. S. (2012). *Winning The Urban War in Rio de Janeiro? Citizen Security and The Favela Pacification Strategy*. San Francisco: Lasa Int Congress.
- Landim, L. (2008). *Thirty years and recent dilemmas: NGOs and Third Sector in Brazil*. Rio de Janeiro: Federal University of Rio de Janeiro.
- Lilian Lopes Ribeiro, E. L. (2015). *A New Approach to Poverty in Brazil: Abidimensional Measurement of Well-Being*. JEL Classification.
- Lydia Richardson, A. K. (2005). *Armed Violence and Proverty in Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: University of Bradford.
- Mantelli, A. (2015). *Mega-Events and HUMAN RIGHTS VIOLATIONS in Rio de Janeiro Dossier*. Rio de Janeiro: World Cup and Olympics Popular Committee of Rio de Janeiro.
- Marcelo B, L. F. (2011). O Efeito UPP na Percepcao dos Moradores das Favelas. *Revista de Ciencias Sociais da PUC-Rio*, 49-98.
- Margaret E. Keck, K. S. (1998). *Activists Beyond Borders*. Ithaca, United States: Cornell University Press.
- Margaret E. Keck, K. S. (1998). *Activists Beyond Borders*. Ithaca: Cornell University Press.
- Margaret E. Keck, K. S. (1999). Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. *Transnational Advocacy Networks*, 92-93.
- Mario. (2014, 10 15). *Sobre Violações de direitos em favelas com UPP*. Retrieved from Sobre Violações de direitos em favelas com UPP: global.org.br/blog/sobre-violacoes-de-direitos-em-favelas-com-upp/
- Michel. (2012). *Mega-Events and Human Rights Violations in Brazil*. Rio de Janeiro: The Neighborhood of Restinga.
- Miraglia, P. (2016). Drugs and Drug Trafficking in Brazil: Trends and Policies. *Improving Global Drug Policy*, 2-3.

- Mohajan, H. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 2.
- Muggah, R. (2016, August 3). *How did Rio's police become known as the most violent in the world?* Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/aug/03/rio-police-violent-killing-olympics-torture>
- Neocleous. (2013). The Dream of Pacification: Accumulation, Class War, and the Hunt. *Estudes Socialistes*, 7-31.
- Nilma Lino Gomes, A. A. (2018). *Pedagogy of Cruelty: Racism and the Extermination of Black Youth*. Belo Horizonte: Educacao em Revista.
- O Dia. (2011, 09 12). *Beltrame nega crise em UPP e reforca que policas corruptos serao expulsos*. Retrieved from Beltrame nega crise em UPP e reforca que policas corruptos serao expulsos: <http://odia.ig.com.br/portal/rio/beltrame-nega-crise-em-UPP-e-refor%C3%A7a-que-policiais-corruptos-ser%C3%A3o-expulsos-1.55271>
- Questionario Senansp. (2013). *Pesquisa Nacional de Vitimizacao*. Datafolha 30 Crisp.
- Ramos, S. (2016). *Violencia e Policia: Tres Decadas de Politicas de Seguranca no Rio de Janeiro*. Boletim Seguranca e Cidadania.
- Rekow, L. (2016). Rio De Janeiro's Olympic Legacy: Public Security for Whom? *Journal of Human Security*, 74-90.
- Riccio, V. (2013). Community policing in the favelas of Rio de Janeiro. *Police Practice and Research*, 308-318.
- Rodrigues, A. (2017, Maret 11). *Work towards abolishing the*. Retrieved from Agencia Brasil: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/direitos-humanos/noticia/2017-03/brazil-reports-it-has-implemented-un-human-rights-recommendations>
- Rodrigues, R. (2014). The dilemmas of pacification: news of war and peace in the 'marvelous city'. *International Journal of Security and Development*, 1-16.
- Schmitz, H. P. (2010). *Transnational Human Rights Networks: Significance and Challenges*. Syracuse: Syracuse University.
- Silva, J. P. (2017). Strategies of Transnational Advocacy Networks for Brazilian Foreign Policy. *Encuentro Latinoamericano*, 66-67.
- Soares, R. (2012, 12 04). *Apos prisao de 59 PMs, Comandante do batalhao de Caxias e Substituido*. Retrieved from Apos prisao de 59 PMs, Comandante

do batalhao de Caxias e Substituido: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/12/apos-prisao-de-59-pms-comandante-do-batalhao-de-caxias-e-substituido.html>

- Soares, R. (2017, 09 18). *Entenda a Guerra na Favela da Rocinha*. Retrieved from Entenda a Guerra na Favela da Rocinha: <https://oglobo.globo.com/rio/entenda-guerra-na-favela-da-rocinha-21836363>
- Terrance Carroll, S. U. (2012). Illusions of Unity: The Paradox Between Mega-Sporting Events and Nation Building. *The Journal of Public Diplomacy*, 13-19.
- United Nations Human Right Council. (2012). *Report of the Working Group on the Universal Periodic*. United Nations.
- United Nations: Office on Drugs and Crime. (2003). *Country Profile: Brazil*. Brasilia: UNODC.
- United States Department of State. (2018). *Country Reports on Human Rights Practices for 2018*. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.
- Vandenberg, L. (2015). *Police Pacification of Rio de Janeiro Favelas in the Context of the 2014 FIFA World Cup*. International Security, Norms and Cooperation Senior Honors Thesis.
- Veloso. (2010). *Governing heterogeneity in the context of 'compulsory closeness: The 'pacification' of favelas*. Emerald Group.
- Vieira da Cunha, N. (2012). *Vivienda popular seguridad publica: el proceso de pacificacion en las favelas de Rio de Janeiro. in dimension del habitat popular latinoamericano*. Ecuador: Instituto de la Ciudad CLASCO.
- Vox (Director). (2016). *2016 Olympics: What Rio doesn't want the world to see* [Motion Picture].
- Wacquant. (2008). The Military of Urban Marginality: Lessons from the Brazilian Metropolis. *International Political Sociology*, 56-74.
- Watts, J. (2015, December 8). *Rio Olympics linked to widespread human rights violations, report reveals*. Retrieved from Theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2015/dec/08/rio-olympics-2016-human-rights-violations-report>
- World Bank. (2006). *Crime, Violence and Economic Development in Brazil: Elements for Effective Public Policy*. Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit Latin America.